



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**KATA PENGANTAR**



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Tanjung Redeb, 17 Februari 2025  
Kepala BKPSDM Kabupaten Berau

**Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651212 199403 2 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 yang diformulasikan dari hasil kinerja sub unit pelayanan administrasi perkantoran serta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan atau bidang-bidang yang menjalankan fungsi peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan disiplin, peningkatan kapasitas sumberdaya, pembinaan dan pengembangan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

LKj-IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Bidang dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini, memuat sasaran dan target

---

kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional dalam peningkatan kapasitas serta pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur.

LKj-IP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Plaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah dan juga mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj-IP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2024 ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan 3 (tiga) program dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, sebagai wujud akuntabilitas BKPSDM Kabupaten Berau dalam melaksanakan mandat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara BKPSDM Kabupaten Berau dengan Bupati Berau, sebagai berikut :

- Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu :
  1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

- 
2. Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
  4. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
  5. Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya
  6. Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
  7. Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
  8. Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
  9. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
- Sasaran II : Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu :
    1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    2. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
    3. Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
    4. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
    5. Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani
    6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
  - Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
    1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
    2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
    3. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian


#### 4. Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Dari ketiga sasaran strategis tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	0,69	0,14	20,29	12.550.314.800,-	11.391.843.884,-	90,77
		90,74	100	110,20			
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	0,29	0,43	148,28	1.255.492.000,-	1.065.421.613,-	84,90
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	90	100	111,11	515.328.000,-	507.956.992,-	98,57

Penyerapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 mencapai 90,59 % atau sebesar Rp 22.984.278.321,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 25.371.260.116,-

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Berau

  
Hj. Sri Eka Takariyati, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1965112 1994 03 2 008

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Sumber Daya Aparatur .....	4
E. Aspek Strategi Organisasi .....	5
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	6
G. Sarana dan Prasarana Kerja .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
A. Perencanaan Strategis .....	8
B. Indikator Kinerja Utama .....	12
C. Perjanjian Kinerja .....	14
1. Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	15
2. Target Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ..	15
3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Analisis Capaian Kinerja .....	20
C. Realisasi Anggaran .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Hal.	
Tabel I.1	Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Berau	3
Tabel I.2	Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2024	4
Tabel I.3	Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Berau	7
Tabel II.1	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	9
Tabel II.2	Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026	10
Tabel II.3	Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program BKPSDM Tahun 2021-2026	11
Tabel II.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2024	14
Tabel II.6	Target Belanja	15
Tabel II.7	Anggaran per Sasaran Strategis	16
Tabel III.1	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	17
Tabel III.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran I)	21
Tabel III.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran II)	21
Tabel III.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran III)	22
Tabel III.5	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran I)	22
Tabel III.6	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran II)	23
Tabel III.7	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran III)	23
Tabel III.8	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran I)	24
Tabel III.9	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran II)	24
Tabel III.10	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran III)	25
Tabel III.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
Tabel III.12	Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	30
Tabel III.13	Realisasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2024	31
Tabel III.14	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2024	31

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 2 Realisasi Perjanjian Kinerja Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026
- Lampiran 5 Rencana Aksi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 6 Realisasi Rencana Aksi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Berau.

### B. Tugas dan Fungsi

Terkait tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau sebagai instansi yang melaksanakan manajemen kepegawaian, mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya aparatur dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Berau “Mewujudkan Berau Sejahtera, unggul, dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”. Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungannya
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkungannya

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan fungsinya.

**C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. UPTB
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau terdiri dari :

Tabel I.1  
Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024



## D. Sumber Daya Aparatur

Tabel I.2  
Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan		1	1				1					
Sekretaris		1	1				1					
Kepala Bidang	2	1	3				2	1				
Kepala Sub Bagian	1	1	1	1			1	1				
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	4	3		7				6	1			
Penelaah Teknis Kebijakan	10	8		18			1	17				
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama		1		1				1				
Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1		2				2				
Pengolah Data dan Informasi	1			1					1			
Pengadministrasian Perkantoran	4	2		4	2					5		1
<b>Jumlah PNS</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>1</b>
<b>Jumlah PPPK</b>	<b>2</b>	<b>1</b>						<b>3</b>				
<b>Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)</b>	<b>8</b>	<b>3</b>						<b>6</b>		<b>5</b>		<b>1</b>
<b>Jumlah PNS + PPPK + PTT</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>2</b>

Dari tabel diatas, jumlah Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 33 orang dan perempuan 23 orang. Berdasarkan golongan/ruang, golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 34 orang dan golongan II sebanyak 2 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari SD 2 orang, SLTA sebanyak 10 orang, Diploma 1 orang, Sarjana sebanyak 37 Orang dan Pasca Sarjana sebanyak 6 orang.

---

## E. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 adalah:

***“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”***

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Berdasarkan misi diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau memiliki fokus pencapaian pada misi ke empat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 terkait dengan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, yaitu :

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Tersedianya jaringan informasi data;
3. Adanya kerjasama antar daerah, provinsi, kabupaten/kota, atau dengan instansi lain yang mendukung pelaksanaan program kerja BKPSDM.;
4. Adanya Komitmen Bupati untuk pengembangan SDM secara menyeluruh;

---

## **F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Visi dan Misi Kabupaten Berau yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Isu strategis dalam perumusan kebijakan kepegawaian daerah
  - Standar Pelayanan Kepegawaian
2. Isu strategis dalam pemberian dukungan terhadap kebijakan kepegawaian
3. Isu strategis bidang mutasi pegawai :
  - a. perencanaan mutasi umum pegawai yang tepat guna dan konsisten dalam pelaksanaannya.
  - b. Penyusunan perencanaan pengadaan pegawai yang berkualitas dan komprehensif Kemampuan mewujudkan penataan dan penempatan PNS dalam jabatan
4. Isu strategis bidang pengembangan pegawai :
  - a. Kemampuan peran BKPSDM dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan karier pegawai dan peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
  - b. Dapat menciptakan tenaga kepamongan yang professional
  - c. Pemantapan sosialisasi, diklat dan bimtek untuk meningkatkan mutu PNS
5. Isu strategis bidang pembinaan :
  - a. Penguatan kerjasama lembaga
  - b. Mewujudkan kesejahteraan PNS
  - c. Meningkatkan disiplin PNS
  - d. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi

## **G. Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau**

Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.400	m <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung Kantor	2.400	m <sup>2</sup>
3	Alat Angkutan a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 4	7 13	Unit
4	Komputer PC	447	Unit
5	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4	Unit
6	Alat Pertanian	5	Unit
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	632	Unit
8	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	174	Unit
9	Alat Laboratorium	32	Unit
10	Alat Persenjataan	2	Unit
11	Bangunan Gedung	2	Unit
12	Instalasi	1	Unit
13	Bahan Perpustakaan	181	Unit

**BAB II  
PERENCANAAN  
KINERJA**

**A. Perencanaan Strategis**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan manifestasi komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

## 1. Visi dan Misi Kepala Daerah

**Tabel II. 1**  
**Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau**  
**Tahun 2021-2026**

VISI	MISI
Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur
	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal
	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan
	Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau bertujuan **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi.** Dengan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

2. Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

3. Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM**  
**Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan integritas tinggi	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	78,59	82,63	86,69	90,74	94,79	98,84
		Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	%	0,4	0,37	0,35	0,29	0,2	0,09	
		Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	%	90	90	90	90	90	90	

### 3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang difokuskan

pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

**Tabel II.3**  
**Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program**  
**Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	SRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	<p>Pendayagunaan dan pengembangan ASN yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan formal sesuai kebutuhan</p> <p>Penyelenggaraan pengembangan ASN berdasarkan merit system yang didukung pola karier yang jelas</p>	<p>Peningkatan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar</p> <p>Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan didasarkan prioritas kebutuhan organisasi dan hasil kebutuhan pelatihan</p>
	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN	Pemeriksaan pelanggaran disiplin
			Penetapan keputusan Hukuman Disiplin
	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Penyelenggaraan peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian melalui penguatan data base pegawai yang up to date	Kompilasi Dokumen Kepegawaian

Proses Perencanaan Strategis adalah Program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah
  - 1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - 1.2. Mutasi dan Promosi ASN
  - 1.3. Pengembangan Kompetensi ASN
  - 1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 1.1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga dan instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian,

Pendidikan dan pelatihan

4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
5. Pelaksanaan UPTB
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Tujuan : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi

**Tabel II.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BKPSDM Kabupaten Berau**  
**Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar -----X 100 Jumlah ASN	Rekapitulasi jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	%	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan -----X 100 Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional	Rekapitulasi Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
2	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	(Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun ini- Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun lalu) -----X 100 Jumlah pelanggaran disiplin/kasus tahun ini	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	%	Jumlah data ASN yang diupdate -----X 100 Jumlah ASN	Rekapitulasi Data kepegawaian yang terupdate	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**Tabel II.5**  
**Perjanjian Kinerja (PK)**  
**BKPSDM Kabupaten Berau**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,69
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	90,74
2	Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	0,29
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	90

<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Rp</b>	<b>10.138.184.028,-</b>
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	555.338.814,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	8.429.986.404,-
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	217.600.526,-

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	514.224.503,-
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	105.288.627,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp	181.855.379,-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	133.889.775,-
<b>B.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Rp</b>	<b>5.569.987.714,-</b>
8.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Rp	2.111.463.136,-
9.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp	817.792.894,-
10.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rp	1.575.310.071,-
11.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	1.065.421.613,-
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Rp</b>	<b>7.395.234.775,-</b>
12.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp	7.395.234.775,-

### 1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 18.673.755.016,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp 25.371.260.116,- dengan rincian Belanja Langsung Rp Rp 15.515.815.651,-, Belanja Tidak Langsung Rp 7.468.462.670,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 22.984.278.321,- (90,59%).

### 2. Target Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau

**Tabel II.6**  
**Target Belanja**  
**BKPSDM Kabupaten Berau**  
**Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	17.388.829.100,-	15.515.815.651,-	89,23
2	Belanja Tidak Langsung	7.982.431.016,-	7.468.462.670,-	93,56
	<b>Jumlah</b>	<b>25.371.260.116,-</b>	<b>22.984.278.321,-</b>	<b>90,59</b>

### 3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Anggaran per Sasaran Strategis**  
**BKPSDM Kabupaten Berau**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	12.550.314.800,-	11.391.843.884,-	90,77
2.	Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	1.255.492.000,-	1.065.421.613,-	84,90
3.	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	515.328.000,-	507.956.992,-	98,57

**BAB III  
AKUNTABILITAS  
KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis

Laporan Akuntabilitas menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan, capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

**A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi**

**Tabel III.1  
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	TW I	-	-	-
					TW II	-	-	-
					TW III	-	-	-
					TW IV	1	1	100
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS	Dokumen	2440	TW I	-	-	-
					TW II	-	-	-

		dan PPPK			TWIII	-	-	-
					TW IV	2440	2349	96,27
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	380	Tw I	280	280	100
					TW II	66	60	90,90
					TWIII	10	9	90
					TW IV	24	24	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	TW I	2	2	100
					TW II	3	3	100
					TWIII	3	3	100
					TW IV	-	-	-
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	TW I	-	-	-
					TW II	-	-	-
					TWIII	-	-	-
					TW IV	50	57	114
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	10	TW I	-	-	-
					TW II	3	3	100
					TWIII	2	1	50
					TW IV	5	5	100
		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	432	TW I	110	110	100
					TW II	254	254	100
					TWIII	68	65	95,59
					TW IV	-	-	-
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	1288	TW I	1179	1179	100
					TW II	-	-	-
					TWIII	-	-	-
					TW IV	109	60	55,04
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Laporan	2058	TW I	389	389	100
					TW II	439	439	100
					TWIII	1047	1165	111,27

		Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan			TW IV	183	183	100
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	47	TW I	-	-	-
					TW II	-	-	-
					TWIII	47	45	95,74
					TW IV	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	230	TW I	92	92	100
					TW II	45	45	100
					TWIII	63	63	100
					TW IV	30	30	100
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	200	TW I	52	50	96,15
					TW II	53	50	94,34
					TWIII	-	-	-
					TW IV	95	90	94,74
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	15	TW I	4	2	50
					TW II	-	-	-
					TWIII	4	1	25
TW IV	7				4	57,14		
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	15	TW I	5	5	100		
			TW II	2	2	100		
			TWIII	3	3	100		
			TW IV	5	5	100		
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	47	TW I	-	-	-		
			TW II	-	-	-		
			TWIII	-	-	-		
			TW IV	47	45	95,74		
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	170	TW I	43	43	100
					TW II	45	45	100
					TWIII	57	57	100

					TW IV	25	25	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5500	TW I	1186	1374	115,85
					TW II	1210	1400	115,70
					TWIII	1163	1351	116,17
					TW IV	1941	2129	109,69
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	100	TW I	22	41	186,36
					TW II	42	81	192,86
					TWIII	17	29	170,59
					TW IV	19	37	194,74
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1200	TW I	220	220	100
					TW II	468	468	100
					TWIII	438	438	100
					TW IV	74	74	100

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi				Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.050.125.316,-	2.204.643.017,-	2.540.118.852,-	2.119.068.690,-	3.274.353.469,-	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.147.046.800,-	293.310.740,-	968.182.164,-	1.058.666.013,-	3.241.387.797,-	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.174.088.000,-	842.845.084,-	1.731.443.944,-	1.450.613.327,-	3.370.332.420,-	

**B. Analisis Capaian Kinerja**

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.2  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	100
2.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2440	2349	96,27
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	380	373	98,16
4.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	8	100
5.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	57	114
6.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	10	9	90
7.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	432	429	99,31
8.	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	1288	1239	96,20
9.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	2058	2176	105,73

Sasaran 2 : Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.3  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	47	45	95,74
2.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	230	230	100
3.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	200	190	95
4.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	Laporan	15	7	46,67

	Pelanggaran Disiplin ASN				
5.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	15	15	100
6.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	47	45	95,74

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.4  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	170	170	100
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5500	6254	113,71
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	100	188	188
4.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1200	1200	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.5  
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	Peningkatan 100%
2.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1315	2349	Peningkatan 78,63%
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	738	373	Penurunan 49,46%
4.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	9	8	Penurunan 11,11%
5.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	57	Peningkatan 100%
6.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	7	9	Peningkatan 128,57%
7.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	532	429	Penurunan 19,36%
8.	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	32	1239	Peningkatan 3771,88%
9.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Laporan	532	2176	Peningkatan 309,02%

	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan				
--	--	--	--	--	--

Sasaran 2 : Meningkatkan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.6

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	47	45	Penurunan 4,25%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	212	230	Peningkatan 8,5%
3.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	0	190	Peningkatan 100%
4.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4	7	Penurunan 175%
5.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	13	15	Penurunan 115,38%
6.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	47	45	Penurunan 4,25%

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.7

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	155	170	Peningkatan 9,68%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4716	6254	Peningkatan 32,61%
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	27	188	Peningkatan 596,30%
4.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2180	1200	Peningkatan 44,95%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.8  
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	100%
2.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	500	2349	369,8%
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	500	373	25,4%
4.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	8	100%
5.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	57	100%
6.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	25	9	64%
7.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	60	429	615%
8.	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	30	1239	4430%
9.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	1000	2176	117,6%

Sasaran 2 : Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.9  
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	30	45	50%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	250	230	8%
3.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	47	190	304,25%

4.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	7	58,33%
5.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	7	15	214,29%
6.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	-	45	100%

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.10  
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	155	170	9,68%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6000	6254	4,23%
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	250	188	24,8%
4.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	900	1200	33,33%

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau pada Tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Kinerja SDM Aparatur yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu :
  1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  2. Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
  4. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN

5. Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya
6. Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
7. Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
8. Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
9. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Dari sasaran I diatas terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dan Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal :

1. Seleksi PPPK Tahap II penjadwalan mundur ke tahun 2025
2. Belum dimilikinya dokumen rencana kebutuhan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Program Studi pendidikan lanjutan tidak sesuai dengan rumpun jabatan yang diampu oleh pemohon tugas belajar.
4. Masih adanya intervensi dari pihak tidak berwenang dalam pemberian penugasan tugas belajar pembiayaan APBD.
5. Kurangnya pemahaman Pegawai Negeri Sipil tentang Tugas Belajar.
6. Jadwal masuk perkuliahan penerima Tugas Belajar mundur ke tahun 2025, sehingga Beasiswa tidak bisa dibayarkan di tahun anggaran 2024

7. Tidak adanya pelaksanaan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, dikarenakan adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak.
8. Sejumlah peserta yang telah dilakukan pemanggilan untuk mengikuti penilaian kompetensi dan potensi tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga jumlah peserta yang menjadi target capaian tidak terpenuhi dan terdapat perubahan pembayaran honorarium tim yang tidak dapat dibayarkan lagi berdasarkan jam pelajaran (JP) dikarenakan telah menggunakan pola kontribusi PNBK  
Adapun solusi terhadap hambatan tersebut, yaitu :
  1. Kegiatan Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II akan dilaksanakan sesuai penjadwalan dari Badan Kepegawaian Nasional di Tahun 2025
  2. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perguruan tinggi agar dapat menambah referensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan peningkatan pendidikan sesuai dengan jabatan yang diampunya.
  3. Membuat regulasi yang jelas terkait pendanaan tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mulai dari kriteria penerima, jumlah dana sampai dengan komponen-komponen pembiayaan.
  4. Melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang tugas belajar melalui berbagai media.
  5. Menyiapkan daftar nominatif penerima Tugas Belajar lebih dari target, apabila terdapat penerima Tugas Belajar yang tidak tepat waktu memulai perkuliahannya dapat digantikan nominatif selanjutnya.
  6. Melaksanakan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku
  7. Membuat sosialisasi tentang pentingnya penilaian kompetensi dan potensi yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah agar tidak

memberikan penugasan lain kepada calon peserta dan memastikan kehadiran peserta tersebut sesuai jadwal.

- Sasaran II : Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu :
  1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  2. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
  3. Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
  4. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  5. Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani
  6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN

Dari sasaran II tersebut semua indikator mencapai target yang telah ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani, yang menggunakan rumus semakin rendah realisasi semakin tinggi kinerjanya.

- Sasaran III : Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
  1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
  3. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
  4. Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Dari sasaran III tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian yang realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Adanya penambahan ASN baru pada tahun 2024 dan pada saat penginputan RKA perubahan tidak dilakukan penyesuaian target capaian.

2. Adanya penambahan output capaian dari sub kegiatan dan tidak dilakukan penyesuaian target

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mencermati setiap tahapan penyusunan dokumen penganggaran dan melakukan penyesuaian target.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.11  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur</b>			
1.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100	99,80	99,8
1.2	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	96,27	96,56	99,70
1.3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	98,16	86,55	113,41
1.4	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100	81,62	122,51
1.5	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	114	93,90	121,40
1.6	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	90	84,76	106,18
1.7	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	99,31	90,52	109,71
1.8	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	96,20	71,78	134,02
1.9	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	105,73	93,08	113,59
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau</b>			
2.1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95,74	85,72	111,69
2.2	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	100	94,83	105,45
2.3	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	95	76,64	123,96
2.4	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	46,67	97,59	47,82
2.5	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	100	97,77	102,28
2.6	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	95,74	93,19	102,74
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian</b>			
3.1	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi	100	97,90	102,14

	Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
3.2	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	113,71	92,32	123,17
3.3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	188	97,64	192,54
3.4	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100	99,99	100,01

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tingkat capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target kinerja, berikut adalah penyajian data program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.12  
Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,69	0,14	20,29	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional		90,74	100	110,20	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
			Pengelolaan Mutasi ASN				
			Pengelolaan Promosi ASN				
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN		0,29	0,43	148,28	
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				

	Kabupaten Berau		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			
			Pembinaan Disiplin ASN			
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			
			Evaluasi Pembinaan Disiplin			
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan		90	100	111,11
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
			Pengelolaan Data Kepegawaian			
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			

### C. Realisasi Anggaran

#### 1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel III.13  
Realisasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	0,69 90,74	0,14 100	20,29 110,20	12.550.314.800,-	11.391.843.884,-	90,77
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	0,29	0,43	148,28	1.255.492.000,-	1.065.421.613,-	84,90
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	90	100	111,11	515.328.000,-	507.956.992,-	98,57

#### 2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Tabel III.14  
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan  
BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.050.125.316,-	10.138.184.028,-	91,75	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	772.518.400,-	555.338.814,-	71,89	

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.993.431.016,-	8.429.986.404,-	93,73	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.750.000,-	217.600.526,-	95,96	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.880.600,-	514.224.503,-	91,19	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.067.200,-	105.288.627,-	93,95	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.470.100,-	181.855.379,-	84,01	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.008.000,-	133.889.775,-	81,14	
<b>2</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>6.147.046.800,-</b>	<b>5.562.987.714,-</b>	<b>90,50</b>	
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.180.865.200,-	2.111.463.136,-	96,82	
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	941.749.000,-	817.792.894,-	86,84	
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	1.768.940.600,-	1.575.310.071,-	89,05	
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.255.492.000,-	1.065.421.613,-	84,86	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.174.088.000,-</b>	<b>7.395.234.775,-</b>	<b>90,47</b>	
3.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	8.174.088.000,-	7.395.234.775,-	90,47	

Penyerapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 mencapai 90,59 % atau sebesar Rp 22.984.278.321,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 25.371.260.116,-

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 melalui bidang-bidang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilakukan sebagai upaya pencapaian target kinerja pada Tahun 2024 :

- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau





- Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024





- Pemutakhiran data ASN Tahun 2024



- Penyerahan SK Kenaikan Pangkat



- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional



- Pelaksanaan Tahapan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



- Pelaksanaan Tahapan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Administrator



- Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau





- Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)



- Pelatihan Bendahara BOSDA



- Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II



- Pelatihan Teknis Coaching dan Mentoring Angkatan I Tahun 2024



- Sosialisasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)



- Penggalian data AKPK ke Perangkat Daerah





- Sosialisasi Peraturan di Bidang Kepegawaian



- Sosialisasi Netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024



- Layanan Kepegawaian





- Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja melalui Aplikasi E-Kinerja Tahun 2024



- Pelaksanaan Upacara HUT KORPRI ke - 53 Tahun 2024



- Penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun







- Koordinasi terkait penyelesaian Tunjangan Hari Tua dan Gaji Pensiun PNS yang memasuki Pensiun



- Kepala BKPSDM Kabupaten Berau menerima penghargaan Indeks Sistem Merit dengan Kategori Baik Tahun 2024





**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau ini di susun sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kepegawaian yang melibatkan stakeholders, sehingga tercipta pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Sebagai wujud upaya penguatan akuntabilitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang

merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi. Untuk itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator kinerja utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana capaian kinerja sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Berau



Hj. Sri Eka Takariyati, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1965112 1994 03 2 008

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., M.M**  
Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWALAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HLJ. SRI JUNIARSIH, MAB, M.Pd**

Jabatan : **BUPATI BERAU**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian dari perjanjian

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur berhadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dapat menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu wujud dan pertanggung jawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau kepada pemberi mandat.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau kepada pemberi mandat, serta untuk mewujudkan VISI dan MISI Bupati melalui perumusan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

**"MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN  
BERAU YANG KOMPETEN, BERDAYA SAING, PROFESIONAL DAN  
BERINTEGRITAS TINGGI"**

Demikian Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini kami susun semoga memberikan manfaat, apabila dalam penyusunan ini ada kesalahan maupun kekurangan mohon, tanggapan, saran dan masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 8 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Berau

HI. ERIKA TAKARIYATI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196512121994032008

**PELAKSIAN BENCANA (PB)  
 BAHAN KEPEKERJAAN PERENCANAAN DAN PELAKSIAN KABUPATEN BOJONEgara  
 TAHUN 2024**

NO	Rencana Strategic	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja KDM Aparatur:	Perentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Perentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural/ fungsional	100% 95,74
2	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegara	Perentase pemrosesan pengaduan disiplin ASN	100%
3	Meningkatnya budaya pelayanan masyarakat	Perentase data kepengawasan yang terungkap/terbaca	100

**PROGRAM**

**ALOKASIKAN**

<b>A. PROGRAM PEMBERIAN SUMBER PENDUKUNGAN DAERAH KABUPATEN/BOJONEGERA</b>	<b>Rp 2.876.282.414</b>
1. Kegiatan Pemrosesan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 100.000.000
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.200.000.000
3. Kegiatan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Rp 100.000.000
4. Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Rp 200.000.000
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 100.000.000
6. Kegiatan Pemeliharaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 100.000.000
7. Kegiatan Pemeliharaan Bimbingan Teknis Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 100.000.000
<b>B. PROGRAM KEPEKERJAAN DAERAH</b>	<b>Rp 2.871.975.000</b>
8. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Instalasi Keperawatan ASN	Rp 570.000.000
9. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp 700.000.000
10. Kegiatan Pengembangan Keperawatan ASN	Rp 1.370.000.000
11. Kegiatan Pendidikan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 1.000.000.000
<b>C. PROGRAM PERDEMBANGAN SUMBER DATA MASYARAKAT</b>	<b>Rp 5.820.400.000</b>
12. Pelaksanaan Identifikasi Komunitas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember	Rp 100.000.000
13. Identifikasi, Eksplorasi, Pengembangan Komunitas Masyarakat dan Pengorganisasian	Rp 5.820.400.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18.876.788.014</b>

Tanjung Pura, Jember, 2024  
 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
 Kabupaten Bojonegara

**EL. HSI HSA TANASTATI, S.P., N.M.**  
 PEMBERI URAHAN MATA  
 NIP. 19681212 199403 2 008

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 8 Januari 2024

**PIRAK KEDUA,**

**BUPATI BERAU**



**HJ. SRI JUNIASRI, MAS, M.Pd**

**PIRAK PERTAMA,**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU**



**HJ. SRI ERA TAKARYATI, S.H., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651212 199403 2 008

**LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BERAU**  
**TAHUN 2024**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Satuan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023	
		K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2	3	7		8	9		10		11		12		13			
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU</b>		<b>25.371.260.116</b>			<b>3.340.798.841</b>		<b>5.248.185.960</b>		<b>4.628.348.030</b>		<b>9.886.073.686</b>		<b>23.103.406.517</b>	<b>214,33</b>	<b>91,06</b>
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>11.050.125.316</b>			<b>2.204.643.017</b>		<b>2.540.118.852</b>		<b>2.119.068.690</b>		<b>3.274.353.469</b>		<b>10.032.117.262</b>	<b>91,44</b>	<b>82,96</b>
5 03 01 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<b>772.518.400</b>			<b>13.252.000</b>		<b>25.785.815</b>		<b>104.154.124</b>		<b>412.146.875</b>		<b>555.338.814</b>		
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	60.468.000	Dokumen	5	3.304.000	3	2.606.000	2	5.531.000	2	32.424.386	12	43.865.386	100,00	72,54
	06 Koordinasi dan Penyusunan :Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	45.000.000	Laporan	5	818.000	2	2.150.000	1	1.200.000	2	31.610.380	2	35.778.380	20,00	79,51
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	667.050.400	Laporan	-	9.130.000	6	21.029.815	3	97.423.124	3	348.112.109	12	475.695.048	100,00	71,31
5 03 01 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<b>8.993.431.016</b>			<b>2.055.617.801</b>		<b>2.328.495.807</b>		<b>1.827.820.631</b>		<b>2.218.052.165</b>		<b>8.429.986.404</b>		
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	700	7.275.599.016	Orang/Bulan	200	1.655.240.621	200	1.945.087.109	150	1.455.085.728	150	1.770.999.012	700	6.826.412.470	100,00	93,83
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.532.400.000	Dokumen	3	400.377.180	3	347.558.698	3	336.884.903	3	338.943.153	12	1.423.763.934	100,00	92,91
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	12	185.432.000	Dokumen	-	-	3	35.850.000	6	35.850.000	3	108.110.000	12	179.810.000	100,00	96,97
5 03 01 2.02	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<b>226.750.000</b>			<b>7.000.000</b>		<b>41.253.066</b>		<b>42.093.760</b>		<b>127.253.700</b>		<b>111.533.760</b>		
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	133	111.750.000	Paket	-	-	-	-	53	39.533.760	80	72.000.000	133	111.533.760	100,00	99,81
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	115.000.000	Orang	2	7.000.000	2	41.253.066	1	2.560.000	8	55.253.700	13	106.066.766	108,33	92,23
5 03 01 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<b>563.880.600</b>			<b>48.730.578</b>		<b>87.498.529</b>		<b>58.007.000</b>		<b>319.988.396</b>		<b>514.224.503</b>		
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	12	4.638.000	Paket	-	-	6	2.045.000	3	495.000	3	2.004.000	12	4.544.000	100,00	97,97
	02 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	12	251.472.800	Paket	-	-	6	28.877.000	3	41.432.400	3	167.721.000	12	238.030.400	100,00	94,65
	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	23.919.800	Paket	-	-	6	1.999.000	3	750.000	3	16.600.000	12	19.349.000	100,00	80,89
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	51.700.000	Paket	3	5.745.000	3	3.317.000	3	8.216.800	3	26.932.600	12	44.211.400	100,00	85,52
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	7.150.000	Paket	3	150.000	3	385.000	3	2.170.000	3	775.000	12	3.480.000	100,00	48,67
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	5.000.000	Dokumen	-	-	6	1.215.000	-	-	6	2.025.000	12	3.240.000	100,00	64,80
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	220.000.000	Laporan	3	42.835.578	3	49.660.529	3	4.942.800	3	103.930.796	12	201.369.703	100,00	91,53
5 03 01 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<b>112.067.200</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>41.038.627</b>		<b>64.250.000</b>		<b>105.288.627</b>		
	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	22.000.000	Unit	-	-	-	-	1	20.938.627	-	-	1	20.938.627	100,00	95,18
	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14	90.067.200	Unit	-	-	-	-	1	20.100.000	13	64.250.000	14	84.350.000	100,00	93,65

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Satuan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023	
		K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2	3	7		8	9		10		11		12		13			
5 03 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan daerah</b>		<b>216.470.100</b>			<b>54.245.038</b>	-	<b>33.200.135</b>	-	<b>33.963.723</b>	-	<b>60.446.483</b>		<b>181.855.379</b>		
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.000.000	Laporan	-	-	-	-	-	-	1	960.000	1	960.000	8,33	32,00
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	169.968.700	Laporan	3	48.713.038	3	26.356.535	3	32.018.723	3	36.794.583	12	143.882.879	100,00	84,65
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12.988.000	Laporan	3	4.500.000	-	-	3	1.500.000	3	6.660.000	9	12.660.000	75,00	97,47
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	30.513.400	Laporan	3	1.032.000	3	6.843.600	3	445.000	3	16.031.900	12	24.352.500	100,00	79,81
5 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>		<b>165.008.000</b>			<b>25.797.600</b>		<b>23.885.500</b>		<b>11.990.825</b>		<b>72.215.850</b>		<b>133.889.775</b>		
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	134.945.000	Unit	3	25.797.600	3	23.885.500	3	11.990.825	3	45.075.850	12	106.749.775	100,00	79,11
	09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	30.063.000	Unit	-	-	-	-	-	-	1	27.140.000	1	27.140.000	50,00	90,28
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>6.147.046.800</b>	-		<b>293.310.740</b>		<b>976.623.164</b>		<b>1.058.666.013</b>		<b>3.241.387.797</b>		<b>5.569.987.714</b>	<b>303,76</b>	<b>92,54</b>
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>2.180.865.200</b>			<b>114.337.700</b>		<b>180.474.676</b>		<b>398.927.251</b>		<b>1.417.723.509</b>		<b>2.111.463.136</b>		<b>96,82</b>
	02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	75.000.000	Dokumen	-	6.255.000	-	27.345.000	-	26.030.000	1	15.220.000	1	74.850.000	100,00	99,80
	03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	600	1.799.917.200	Dokumen	-	57.858.080	-	112.810.856	-	319.587.834	2.349	1.247.752.131	2.349	1.738.008.901	391,50	96,56
	06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	170	85.000.000	Dokumen	43	25.637.909	45	15.762.940	57	3.540.000	25	38.278.123	170	83.218.972	100,00	97,90
	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5500	110.948.000	Dokumen	1.374	6.952.050	1.400	16.114.880	1.351	32.876.030	2.129	52.035.860	6.254	107.978.820	113,71	97,32
	11 Pengelolaan Data Kepegawaian	100	110.000.000	Dokumen	41	17.634.661	81	8.441.000	29	16.893.387	37	64.437.395	188	107.406.443	188,00	97,64
5 03 02 2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>941.749.000</b>	-		<b>74.149.475</b>		<b>286.444.374</b>		<b>205.138.595</b>		<b>252.060.450</b>		<b>817.792.894</b>		
	01 Pengelolaan Mutasi ASN	250	216.629.000	Dokumen	280	29.908.205	60	69.983.394	9	34.426.000	24	53.180.329	373	187.497.928	149,20	86,55
	02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	209.380.000	Dokumen	220	23.777.445	468	64.223.371	438	30.074.000	74	91.277.941	1.200	209.352.757	120,00	99,99
	03 Pengelolaan Promosi ASN	3	515.740.000	Dokumen	2	20.463.825	3	152.237.609	3	140.638.595	-	107.602.180	8	420.942.209	266,67	81,62
5 03 02 2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>1.768.940.600</b>	-		<b>46.730.414</b>		<b>372.100.786</b>		<b>298.535.106</b>		<b>857.943.765</b>		<b>1.575.310.071</b>		
	01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	50	433.594.000	Orang	-	1.400.000	-	9.618.162	-	9.696.000	57	386.433.575	57	407.147.737	114,00	93,90
	04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	8	704.998.600	Orang	-	-	3	168.998.713	1	85.910.524	5	342.654.055	9	597.563.292	112,50	84,76
	14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15	630.348.000	Orang	110	45.330.414	254	193.483.911	65	202.928.582	-	128.856.135	429	570.599.042	2.860,00	90,52
5 03 02 2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>1.255.492.000</b>	-		<b>58.093.151</b>		<b>137.603.328</b>		<b>156.065.061</b>		<b>713.660.073</b>		<b>1.065.421.613</b>		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Satuan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023			
		K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
2	3	7		8	9		10		11		12		13					
	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	47	244.536.000	Dokumen	-	19.382.680	-	22.450.380	45	28.513.140	-	140.752.304	45	211.098.504	95,74	86,33	
	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	230	106.700.000	Dokumen	92	-	45	16.447.200	63	16.141.428	-	68.590.664	200	101.179.292	86,96	94,83	
	07	Pembinaan Disiplin ASN	200	625.016.000	Orang	50	12.473.520	-	69.675.108	-	51.440.000	47	350.958.482	97	484.547.110	48,50	77,53	
	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15	112.120.000	Laporan	2	20.097.193	-	9.864.380	1	16.740.680	-	62.715.792	3	109.418.045	20,00	97,59	
	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15	75.000.000	Dokumen	5	-	2	5.379.000	3	20.030.103	4	47.921.970	14	73.331.073	93,33	97,77	
	10	Evaluasi Disiplin ASN	47	92.120.000	Laporan	-	6.139.758	1	13.787.260	-	23.199.710	46	42.720.861	47	85.847.589	100,00	93,19	
5	03	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.174.088.000</b>	-	<b>842.845.084</b>	<b>1.731.443.944</b>		<b>1.450.613.327</b>	<b>3.370.332.420</b>	<b>7.395.234.775</b>	<b>247,80</b>	<b>71,78</b>					
5	03	02	2.01 <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>8.174.088.000</b>		<b>842.845.084</b>	<b>1.731.443.944</b>		<b>1.450.613.327</b>	<b>3.370.332.420</b>	<b>7.395.234.775</b>							
		03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	500	1.000.484.000	Orang	1.179	368.933.409	-	65.699.700	-	60	283.523.499	1.239	718.156.608	247,80	71,78	
		07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1200	7.173.604.000	Orang	389	473.911.675	439	1.665.744.244	1.165	1.450.613.327	183	3.086.808.921	2.176	6.677.078.167	181,33	93,08
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>25.371.260.116</b>			<b>3.340.798.841</b>		<b>5.248.185.960</b>		<b>4.628.348.030</b>		<b>9.886.073.686</b>		<b>23.103.406.517</b>	<b>214,33</b>	<b>91,06</b>	

Tanjung Redeb, 31 Desember 2024

KEPALA BKPSDM KABUPATEN BERAU

**Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651212 199403 2 008

## PENGUKURAN KINERJA ESELON II

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Penzadaan ASN	Dokumen	1	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	1	1	100
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2440	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	2440	2349	96,27
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	380	Triwulan I	280	280	100,00
					Triwulan II	66	60	90,91
					Triwulan III	10	9	90,00
					Triwulan IV	24	24	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	Triwulan I	2	2	100
					Triwulan II	3	3	100
					Triwulan III	3	3	100
					Triwulan IV	0	0	0
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	50	57	114
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	10	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	3	3	100
					Triwulan III	2	1	50
					Triwulan IV	5	5	100
Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	432	Triwulan I	110	110	100		
			Triwulan II	254	254	100		
			Triwulan III	68	65	95,59		
			Triwulan IV	0	0	0		
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	1288	Triwulan I	1179	1179	100		
			Triwulan II	0	0	0		
			Triwulan III	0	0	0		
			Triwulan IV	109	60	55,05		

		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan	Laporan	2058	Triwulan I	389	389	100
					Triwulan II	439	439	100
					Triwulan III	1047	1165	111,27
					Triwulan IV	183	183	100
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	47	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	47	45	95,74
					Triwulan IV	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	230	Triwulan I	92	92	100
					Triwulan II	45	45	100
					Triwulan III	63	63	100
					Triwulan IV	30	30	100
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	200	Triwulan I	52	50	96,15
					Triwulan II	53	50	94,34
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	95	90	94,74
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	15	Triwulan I	4	2	50
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	4	1	25
					Triwulan IV	7	4	57,14
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	15	Triwulan I	5	5	100
					Triwulan II	2	2	100
					Triwulan III	3	3	100
					Triwulan IV	5	5	100
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	47	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	47	45	95,74
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	170	Triwulan I	43	43	100
					Triwulan II	45	45	100
					Triwulan III	57	57	100
					Triwulan IV	25	25	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5500	Triwulan I	1186	1374	115,85
					Triwulan II	1210	1400	115,70
					Triwulan III	1163	1351	116,17
					Triwulan IV	1941	2129	109,69
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	100	Triwulan I	22	41	186,36
					Triwulan II	42	81	192,86
					Triwulan III	17	29	170,59
					Triwulan IV	19	37	194,74

		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1200	Triwulan I	220	220	100
					Triwulan II	468	468	100
					Triwulan III	438	438	100
					Triwulan IV	74	74	100

NO	Program	Anggaran		Realisasi				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
	2	3		4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.050.125.316		Rp 2.204.643.017	Rp 2.540.118.852	Rp 2.119.068.690	Rp 3.274.353.469	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 6.147.046.800,00		Rp 293.310.740	Rp 968.182.164	Rp 1.058.666.013	Rp 3.241.387.797	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 8.174.088.000,00		Rp 842.845.084	Rp 1.731.443.944	Rp 1.450.613.327	Rp 3.370.332.420	

Tanjung Redeb, 31 Desember 2024

Kepala BKPSDM Kabupaten Berau



HJ. Sri Eka Takaryati, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 199403 2 008



# INDIKATOR KINERJA UTAMA



TAHUN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
Jl. Mawar No. 5 Telp / Fax (0554) 21406  
TANJUNG REDEB

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BERAU**

**NOMOR : 1221 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BERAU 2016-2021**

**KEPALA BKPP KABUPATEN BERAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau perlu menetapkan indikator kinerja;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan tentang penetapan indikator kinerja utama (key performance indicators) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 073 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau untuk menyusun :

- a. Rencana Kinerja Tahunan,
- b. Rencana Kerja dan Anggaran,
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK),
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TanjungRedeb  
Pada tanggal, : 11 Nopember 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BERAU**



**MUHAMMAD SAID S.H., M.H**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790723 200212 1 001

Lampiran  
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau  
Nomor : 1221 Tahun 2021  
Tanggal : 11 Nopember 2021  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
TAHUN 2021-2026**

Instansi : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau  
Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan UPTB;
6. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6						8	9
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar -----X 100 Jumlah ASN	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	Rekapitulasi jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	Bidang Pengembangan Aparatur
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat + Jumlah ASN yang akan pensiun -----X 100 Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional	78,5 9	82,6 3	86,6 9	90,7 4	94,7 9	98,8 4	Rekapitulasi Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat	Bidang Pengembangan Aparatur
		Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	(Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun lalu- Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun ini) -----X 100 Jumlah pelanggaran disiplin/kasus tahun lalu	0,4	0,37	0,35	0,29	0,2	0,09	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin	Bidang Pembinaan Aparatur
		Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	Jumlah data ASN yang diupdate -----X 100 Jumlah ASN	90	90	90	90	90	90	Rekapitulasi Data kepegawaian yang terupdate	Bidang Mutasi Aparatur

**Tanjung Redeb, 11 Nopember 2021**  
**Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kabupaten Berau**

**MUHAMMAD SAID, S.H., M.H**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 19790723 200212 1 001**

**RENCANA AKSI (ANGGARAN PERUBAHAN) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis					Program dan Kegiatan/sub Kegiatan							Anggaran Program dan Kegiatan	Target		Penanggung jawab	
	Uraian	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target		Uraian	Indikator Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target			Triwulan (Tw)	Target		
				Triwulan (Tw)	Target						Triwulan (Tw)	Target					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja								
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Tw 1	3	Rp 60.468.000	Tw 1	Rp 24.187.200	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
											Tw 2	3	Tw 2		Rp 18.140.400		
											Tw 3	3	Tw 3		Rp 12.093.600		
											Tw 4	3	Tw 4		Rp 6.046.800		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Tw 1	3	Rp 45.000.000	Tw 1	Rp 18.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
											Tw 2	0	Tw 2		Rp 13.500.000		
											Tw 3	3	Tw 3		Rp 9.000.000		
											Tw 4	4	Tw 4		Rp 4.500.000		
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Tw 1	3	Rp 667.050.400	Tw 1	Rp 266.820.160	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
											Tw 2	3	Tw 2		Rp 200.115.120		
											Tw 3	3	Tw 3		Rp 133.410.080		
											Tw 4	3	Tw 4		Rp 66.705.040		
								<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Keuangan Perangkat Daerah								
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Orang/Bulan		Tw 1	200	Rp 7.275.599.016	Tw 1	Rp 2.910.239.606	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
										Tw 2	200	Tw 2		Rp 2.182.679.705			
										Tw 3	150	Tw 3		Rp 1.455.119.803			
										Tw 4	150	Tw 4		Rp 727.559.902			
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Tw 1	3	Rp 1.532.400.000	Tw 1	Rp 612.960.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
										Tw 2	3	Tw 2		Rp 459.720.000			
										Tw 3	3	Tw 3		Rp 306.480.000			
										Tw 4	3	Tw 4		Rp 153.240.000			
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Tw 1	3	Rp 185.432.000	Tw 1	Rp 74.172.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
										Tw 2	3	Tw 2		Rp 55.629.600			
										Tw 3	3	Tw 3		Rp 37.086.400			
										Tw 4	3	Tw 4		Rp 18.543.200			

							<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah							
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Tw 1	0	Rp 111.750.000	Tw 1	Rp 44.700.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	60		Tw 2	Rp 33.525.000	
										Tw 3	0		Tw 3	Rp 22.350.000	
										Tw 4	0		Tw 4	Rp 11.175.000	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	Tw 1	3	Rp 115.000.000	Tw 1	Rp 46.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	6		Tw 2	Rp 34.500.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 23.000.000	
										Tw 4	0		Tw 4	Rp 11.500.000	
							<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dan Pelaksanaan Kegiatan							
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 4.638.000	Tw 1	Rp 1.855.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 1.391.400	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 927.600	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 463.800	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 251.472.800	Tw 1	Rp 100.589.120	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 75.441.840	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 50.294.560	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 25.147.280	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 23.919.800	Tw 1	Rp 9.567.920	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 7.175.940	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 4.783.960	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 2.391.980	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 51.700.000	Tw 1	Rp 20.680.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 15.510.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 10.340.000	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 5.170.000	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 7.150.000	Tw 1	Rp 2.860.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 2.145.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 1.430.000	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 715.000	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	Tw 1	3	Rp 5.000.000	Tw 1	Rp 2.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 1.500.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 1.000.000	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 500.000	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tw 1	3	Rp 220.000.000	Tw 1	Rp 88.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 66.000.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 44.000.000	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 22.000.000	



						<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	<b>Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Jumlah pemenuhan kebutuhan sesuai formasi dan jumlah data kepegawaian yang diupdate									
								Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Tw 1	0	Rp	75.000.000	Tw 1	Rp	30.000.000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	0		Tw 2	Rp	22.500.000		
											Tw 3	0		Tw 3	Rp	15.000.000		
											Tw 4	1		Tw 4	Rp	7.500.000		
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Tw 1	0	Rp	1.799.917.200	Tw 1	Rp	719.966.880	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	0		Tw 2	Rp	539.975.160		
											Tw 3	0		Tw 3	Rp	359.983.440		
											Tw 4	2440		Tw 4	Rp	179.991.720		
								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Orang	Tw 1	43	Rp	85.000.000	Tw 1	Rp	34.000.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
											Tw 2	45		Tw 2	Rp	25.500.000		
											Tw 3	57		Tw 3	Rp	17.000.000		
											Tw 4	25		Tw 4	Rp	8.500.000		
1	<b>Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian</b>	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	Orang	Tw 1	2000			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Tw 1	1186	Rp	110.948.000	Tw 1	Rp	44.379.200	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
				Tw 2	1500						Tw 2	1210		Tw 2	Rp	33.284.400		
				Tw 3	1000						Tw 3	1163		Tw 3	Rp	22.189.600		
				Tw 4	500						Tw 4	1941		Tw 4	Rp	11.094.800		
								Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Tw 1	22	Rp	110.000.000	Tw 1	Rp	44.000.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
											Tw 2	42		Tw 2	Rp	33.000.000		
											Tw 3	17		Tw 3	Rp	22.000.000		
											Tw 4	19		Tw 4	Rp	11.000.000		
								<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Jumlah ASN yang terlayani dalam pengurusan mutasi dan kepangkatan serta kesesuaian jabatan dengan									
								Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Tw 1	280	Rp	216.629.000	Tw 1	Rp	86.651.600	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	66		Tw 2	Rp	64.988.700		
											Tw 3	10		Tw 3	Rp	43.325.800		
											Tw 4	24		Tw 4	Rp	21.662.900		
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Tw 1	220	Rp	209.380.000	Tw 1	Rp	83.752.000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	468		Tw 2	Rp	62.814.000		
											Tw 3	438		Tw 3	Rp	41.876.000		
											Tw 4	74		Tw 4	Rp	20.938.000		
								Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Tw 1	2	Rp	515.740.000	Tw 1	Rp	206.296.000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	3		Tw 2	Rp	154.722.000		
											Tw 3	3		Tw 3	Rp	103.148.000		
											Tw 4	0		Tw 4	Rp	51.574.000		



		Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	SK	Tw 1	6			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Tw 1	4	Rp	112.120.000	Tw 1	Rp	44.848.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
				Tw 2	6						Tw 2	0			Tw 2	Rp	33.636.000	
				Tw 3	6						Tw 3	4			Tw 3	Rp	22.424.000	
				Tw 4	5						Tw 4	7			Tw 4	Rp	11.212.000	
								Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Dokumen	Tw 1	5	Rp	75.000.000	Tw 1	Rp	30.000.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
											Tw 2	2			Tw 2	Rp	22.500.000	
											Tw 3	3			Tw 3	Rp	15.000.000	
											Tw 4	5			Tw 4	Rp	7.500.000	
								Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	Tw 1	0	Rp	92.120.000	Tw 1	Rp	36.848.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
											Tw 2	0			Tw 2	Rp	27.636.000	
											Tw 3	0			Tw 3	Rp	18.424.000	
											Tw 4	47			Tw 4	Rp	9.212.000	
						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Jumlah ASN (JPT, JA yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan CPNS mengikuti Prajabatan)									
	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur</b>	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	Tw 1	233			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	Tw 1	1179	Rp	1.000.484.000	Tw 1	Rp	400.193.600	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
			Tw 2	280	Tw 2						0	Tw 2			Rp	300.145.200		
			Tw 3	210	Tw 3						0	Tw 3			Rp	200.096.800		
			Tw 4	210	Tw 4						109	Tw 4			Rp	100.048.400		
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	Tw 1	389	Rp	7.173.604.000	Tw 1	Rp	2.869.441.600	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
					Tw 2						439	Tw 2			Rp	2.152.081.200		
					Tw 3						1047	Tw 3			Rp	1.434.720.800		
					Tw 4						183	Tw 4			Rp	717.360.400		

Ket :

\* Pada kolom (14) diisi dengan KAS ANGGARAN pada DPA

Tanjung Redeb, 20 September 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BERAU,

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651212 199403 2 008

**REALISASI RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis						Program dan Kegiatan/sub Kegiatan								Anggaran Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi				Rencana Aksi	
	Uraian	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target dan Realisasi			Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi					Triwulan (Tw)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
				Triwulan (Tw)	Target	Realisasi					Capaian (%)	Triwulan (Tw)	Target	Realisasi							Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja													
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tw 1	3	5	166,67	Rp	60.468.000	Tw 1	Rp	24.187.200	Rp	3.304.000	13,66
										Tw 2	3	3	100,00			Tw 2	Rp	18.140.400	Rp	2.606.000	14,37
										Tw 3	3	2	66,67			Tw 3	Rp	12.093.600	Rp	5.531.000	45,73
										Tw 4	3	2	66,67			Tw 4	Rp	6.046.800	Rp	32.424.386	536,22
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tw 1	3	5	166,67	Rp	45.000.000	Tw 1	Rp	18.000.000	Rp	818.000	4,54
										Tw 2	0	2	#DIV/0!			Tw 2	Rp	13.500.000	Rp	2.150.000	15,93
										Tw 3	3	1	33,33			Tw 3	Rp	9.000.000	Rp	1.200.000	13,33
										Tw 4	4	2	50,00			Tw 4	Rp	4.500.000	Rp	31.610.380	702,45
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tw 1	3	0	0,00	Rp	667.050.400	Tw 1	Rp	266.820.160	Rp	9.130.000	3,42
										Tw 2	3	6	200,00			Tw 2	Rp	200.115.120	Rp	21.029.815	10,51
										Tw 3	3	3	100,00			Tw 3	Rp	133.410.080	Rp	97.423.124	73,03
										Tw 4	3	3	100,00			Tw 4	Rp	66.705.040	Rp	348.112.109	521,87
							<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Keuangan Perangkat Daerah													
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Tw 1	200	200	100,00	Rp	7.275.599.016	Tw 1	Rp	2.910.239.606	Rp	1.655.240.621	56,88
										Tw 2	200	200	100,00			Tw 2	Rp	2.182.679.705	Rp	1.945.087.109	89,11
										Tw 3	150	150	100,00			Tw 3	Rp	1.455.119.803	Rp	1.455.085.728	100,00
										Tw 4	150	150	100,00			Tw 4	Rp	727.559.902	Rp	1.770.990.012	243,42
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Tw 1	3	3	100,00	Rp	1.532.400.000	Tw 1	Rp	612.960.000	Rp	400.377.180	65,32
										Tw 2	3	3	100,00			Tw 2	Rp	459.720.000	Rp	347.558.698	75,60
										Tw 3	3	3	100,00			Tw 3	Rp	306.480.000	Rp	336.884.903	109,92
										Tw 4	3	3	100,00			Tw 4	Rp	153.240.000	Rp	338.943.153	221,18
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Tw 1	3	0	0,00	Rp	185.432.000	Tw 1	Rp	74.172.800	Rp	35.850.000	48,33
										Tw 2	3	3	100,00			Tw 2	Rp	55.629.600	Rp	35.850.000	64,44
										Tw 3	3	6	200,00			Tw 3	Rp	37.086.400	Rp	35.850.000	96,67
										Tw 4	3	3	100,00			Tw 4	Rp	18.543.200	Rp	108.110.000	583,02
							<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah													
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	111.750.000	Tw 1	Rp	44.700.000	Rp	-	0,00
										Tw 2	0	0	#DIV/0!			Tw 2	Rp	33.525.000	Rp	-	0,00
										Tw 3	60	53	88,33			Tw 3	Rp	22.350.000	Rp	39.533.760	176,88
										Tw 4	80	80	100			Tw 4	Rp	11.175.000	Rp	72.000.000	644,30
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	Tw 1	2	2	100,00	Rp	115.000.000	Tw 1	Rp	46.000.000	Rp	7.000.000	15,22
										Tw 2	2	2	100,00			Tw 2	Rp	34.500.000	Rp	41.253.066	119,57
										Tw 3	1	1	100,00			Tw 3	Rp	23.000.000	Rp	2.560.000	11,13
										Tw 4	7	8	114,29			Tw 4	Rp	11.500.000	Rp	55.253.700	480,47
							<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dan Pelaksanaan Kegiatan													
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	4.638.000	Tw 1	Rp	1.855.200	Rp	-	0,00
										Tw 2	6	6	100,00			Tw 2	Rp	1.391.400	Rp	2.045.000	146,97
										Tw 3	3	3	100,00			Tw 3	Rp	927.600	Rp	495.000	53,36
										Tw 4	3	3	100,00			Tw 4	Rp	463.800	Rp	2.004.000	432,08








										Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	92.120.000	Tw 1	Rp	36.848.000	Rp	6.139.758	16,66			
													Tw 2	0	0	#DIV/0!			Tw 2	Rp	27.636.000	Rp	13.787.260	49,89			
													Tw 3	0	0	#DIV/0!			Tw 3	Rp	18.424.000	Rp	23.199.710	125,92			
													Tw 4	47	45	95,74			Tw 4	Rp	9.212.000	Rp	42.720.861	463,75			
										<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Jumlah ASN (JPT, JA yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan CPNS mengikuti Prajabatan)																
	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur</b>	Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	%		90,74	100	110,20	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	Tw 1	1179	1179	100,00	Rp	1.000.484.000	Tw 1	Rp	400.193.600	Rp	368.933.409	92,19	Melaksanakan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi PNS			
												Tw 2	0	0	#DIV/0!			Tw 2	Rp	300.145.200	Rp	65.699.700	21,89				
												Tw 3	0	0	#DIV/0!			Tw 3	Rp	200.096.800	Rp	-	0,00				
												Tw 4	109	60	55,05			Tw 4	Rp	100.048.400	Rp	283.523.499	283,39				
									Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	Tw 1	389	389	100,00	Rp	7.173.604.000	Tw 1	Rp	2.869.441.600	Rp	473.911.675	16,52	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi untuk PNS, CPNS dan PPPK			
												Tw 2	439	439	100,00			Tw 2	Rp	2.152.081.200	Rp	1.665.744.244	77,40				
												Tw 3	1047	1165	111,27			Tw 3	Rp	1.434.720.800	Rp	1.450.613.327	101,11				
												Tw 4	183	183	100,00			Tw 4	Rp	717.360.400	Rp	3.086.808.921	430,30				

Ket :

\* Pada kolom (14) diisi dengan KAS ANGGARAN pada DPA

Tanjung Redeb, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU

  
Hj. SRLEKA TAKARIYATI, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651212 199403 2 008

**KATA PENGANTAR**



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Tanjung Redeb, 17 Februari 2025  
Kepala BKPSDM Kabupaten Berau

**Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651212 199403 2 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 yang diformulasikan dari hasil kinerja sub unit pelayanan administrasi perkantoran serta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan atau bidang-bidang yang menjalankan fungsi peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan disiplin, peningkatan kapasitas sumberdaya, pembinaan dan pengembangan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

LKj-IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Bidang dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini, memuat sasaran dan target

---

kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional dalam peningkatan kapasitas serta pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur.

LKj-IP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Plaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah dan juga mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj-IP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2024 ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan 3 (tiga) program dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, sebagai wujud akuntabilitas BKPSDM Kabupaten Berau dalam melaksanakan mandat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara BKPSDM Kabupaten Berau dengan Bupati Berau, sebagai berikut :

- Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu :
  1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

- 
2. Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
  4. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
  5. Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya
  6. Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
  7. Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
  8. Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
  9. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
- Sasaran II : Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu :
    1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
    2. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
    3. Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
    4. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
    5. Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani
    6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
  - Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
    1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
    2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
    3. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian


#### 4. Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Dari ketiga sasaran strategis tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	0,69	0,14	20,29	12.550.314.800,-	11.391.843.884,-	90,77
		90,74	100	110,20			
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	0,29	0,43	148,28	1.255.492.000,-	1.065.421.613,-	84,90
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	90	100	111,11	515.328.000,-	507.956.992,-	98,57

Penyerapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 mencapai 90,59 % atau sebesar Rp 22.984.278.321,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 25.371.260.116,-

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Berau

  
Hj. Sri Eka Takariyati, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1965112 1994 03 2 008

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Sumber Daya Aparatur .....	4
E. Aspek Strategi Organisasi .....	5
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	6
G. Sarana dan Prasarana Kerja .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	8
A. Perencanaan Strategis .....	8
B. Indikator Kinerja Utama .....	12
C. Perjanjian Kinerja .....	14
1. Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	15
2. Target Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ..	15
3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Analisis Capaian Kinerja .....	20
C. Realisasi Anggaran .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	52
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Hal.	
Tabel I.1	Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Berau	3
Tabel I.2	Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2024	4
Tabel I.3	Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Berau	7
Tabel II.1	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	9
Tabel II.2	Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026	10
Tabel II.3	Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program BKPSDM Tahun 2021-2026	11
Tabel II.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2024	14
Tabel II.6	Target Belanja	15
Tabel II.7	Anggaran per Sasaran Strategis	16
Tabel III.1	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	17
Tabel III.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran I)	21
Tabel III.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran II)	21
Tabel III.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Sasaran III)	22
Tabel III.5	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran I)	22
Tabel III.6	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran II)	23
Tabel III.7	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Sasaran III)	23
Tabel III.8	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran I)	24
Tabel III.9	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran II)	24
Tabel III.10	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (Sasaran III)	25
Tabel III.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
Tabel III.12	Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	30
Tabel III.13	Realisasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2024	31
Tabel III.14	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Berau Tahun 2024	31

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Cascading Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 3 Realisasi Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 5 Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2021-2026
- Lampiran 6 Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024
- Lampiran 7 Realisasi Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Berau.

### B. Tugas dan Fungsi

Terkait tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau sebagai instansi yang melaksanakan manajemen kepegawaian, mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya aparatur dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Berau “Mewujudkan Berau Sejahtera, unggul, dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”. Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungannya
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkungannya

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan fungsinya.

**C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. UPTB
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau terdiri dari :

Tabel I.1  
Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024



## D. Sumber Daya Aparatur

Tabel I.2  
Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan		1	1				1					
Sekretaris		1	1				1					
Kepala Bidang	2	1	3				2	1				
Kepala Sub Bagian	1	1	1	1			1	1				
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	4	3		7				6	1			
Penelaah Teknis Kebijakan	10	8		18			1	17				
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama		1		1				1				
Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1		2				2				
Pengolah Data dan Informasi	1			1					1			
Pengadministrasian Perkantoran	4	2		4	2					5		1
<b>Jumlah PNS</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>1</b>
<b>Jumlah PPPK</b>	<b>2</b>	<b>1</b>						<b>3</b>				
<b>Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)</b>	<b>8</b>	<b>3</b>						<b>6</b>		<b>5</b>		<b>1</b>
<b>Jumlah PNS + PPPK + PTT</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>2</b>

Dari tabel diatas, jumlah Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 33 orang dan perempuan 23 orang. Berdasarkan golongan/ruang, golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 34 orang dan golongan II sebanyak 2 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari SD 2 orang, SLTA sebanyak 10 orang, Diploma 1 orang, Sarjana sebanyak 37 Orang dan Pasca Sarjana sebanyak 6 orang.

---

## E. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 adalah:

***“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”***

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Berdasarkan misi diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau memiliki fokus pencapaian pada misi ke empat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 terkait dengan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, yaitu :

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Tersedianya jaringan informasi data;
3. Adanya kerjasama antar daerah, provinsi, kabupaten/kota, atau dengan instansi lain yang mendukung pelaksanaan program kerja BKPSDM.;
4. Adanya Komitmen Bupati untuk pengembangan SDM secara menyeluruh;

---

## **F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Visi dan Misi Kabupaten Berau yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Isu strategis dalam perumusan kebijakan kepegawaian daerah
  - Standar Pelayanan Kepegawaian
2. Isu strategis dalam pemberian dukungan terhadap kebijakan kepegawaian
3. Isu strategis bidang mutasi pegawai :
  - a. perencanaan mutasi umum pegawai yang tepat guna dan konsisten dalam pelaksanaannya.
  - b. Penyusunan perencanaan pengadaan pegawai yang berkualitas dan komprehensif Kemampuan mewujudkan penataan dan penempatan PNS dalam jabatan
4. Isu strategis bidang pengembangan pegawai :
  - a. Kemampuan peran BKPSDM dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan karier pegawai dan peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
  - b. Dapat menciptakan tenaga kepamongan yang professional
  - c. Pemantapan sosialisasi, diklat dan bimtek untuk meningkatkan mutu PNS
5. Isu strategis bidang pembinaan :
  - a. Penguatan kerjasama lembaga
  - b. Mewujudkan kesejahteraan PNS
  - c. Meningkatkan disiplin PNS
  - d. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi

## **G. Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau**

Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.400	m <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung Kantor	2.400	m <sup>2</sup>
3	Alat Angkutan a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 4	7 13	Unit
4	Komputer PC	447	Unit
5	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4	Unit
6	Alat Pertanian	5	Unit
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	632	Unit
8	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	174	Unit
9	Alat Laboratorium	32	Unit
10	Alat Persenjataan	2	Unit
11	Bangunan Gedung	2	Unit
12	Instalasi	1	Unit
13	Bahan Perpustakaan	181	Unit

**BAB II  
PERENCANAAN  
KINERJA**

**A. Perencanaan Strategis**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan manifestasi komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

## 1. Visi dan Misi Kepala Daerah

**Tabel II. 1**  
**Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau**  
**Tahun 2021-2026**

VISI	MISI
Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur
	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal
	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan
	Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau bertujuan **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi.** Dengan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

2. Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

3. Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM**  
**Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan integritas tinggi	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	78,59	82,63	86,69	90,74	94,79	98,84
		Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	%	0,4	0,37	0,35	0,29	0,2	0,09	
		Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	%	90	90	90	90	90	90	

### 3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang difokuskan

pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

**Tabel II.3**  
**Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program**  
**Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	SRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	<p>Pendayagunaan dan pengembangan ASN yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan formal sesuai kebutuhan</p> <p>Penyelenggaraan pengembangan ASN berdasarkan merit system yang didukung pola karier yang jelas</p>	<p>Peningkatan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar</p> <p>Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan didasarkan prioritas kebutuhan organisasi dan hasil kebutuhan pelatihan</p>
	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN	Pemeriksaan pelanggaran disiplin
			Penetapan keputusan Hukuman Disiplin
	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Penyelenggaraan peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian melalui penguatan data base pegawai yang up to date	Kompilasi Dokumen Kepegawaian

Proses Perencanaan Strategis adalah Program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah
  - 1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - 1.2. Mutasi dan Promosi ASN
  - 1.3. Pengembangan Kompetensi ASN
  - 1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 1.1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga dan instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian,

Pendidikan dan pelatihan

4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
5. Pelaksanaan UPTB
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Tujuan : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi

**Tabel II.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BKPSDM Kabupaten Berau**  
**Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar -----X 100 Jumlah ASN	Rekapitulasi jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	%	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan -----X 100 Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional	Rekapitulasi Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
2	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	(Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun ini- Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun lalu) -----X 100 Jumlah pelanggaran disiplin/kasus tahun ini	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	%	Jumlah data ASN yang diupdate -----X 100 Jumlah ASN	Rekapitulasi Data kepegawaian yang terupdate	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**Tabel II.5**  
**Perjanjian Kinerja (PK)**  
**BKPSDM Kabupaten Berau**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,69
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	90,74
2	Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	0,29
3	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	90

<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Rp</b>	<b>10.138.184.028,-</b>
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	555.338.814,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	8.429.986.404,-
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	217.600.526,-

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	514.224.503,-
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	105.288.627,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp	181.855.379,-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	133.889.775,-
<b>B.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Rp</b>	<b>5.569.987.714,-</b>
8.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Rp	2.111.463.136,-
9.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp	817.792.894,-
10.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rp	1.575.310.071,-
11.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	1.065.421.613,-
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Rp</b>	<b>7.395.234.775,-</b>
12.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp	7.395.234.775,-

### 1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 18.673.755.016,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp 25.371.260.116,- dengan rincian Belanja Langsung Rp Rp 15.515.815.651,-, Belanja Tidak Langsung Rp 7.468.462.670,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 22.984.278.321,- (90,59%).

### 2. Target Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau

**Tabel II.6**  
**Target Belanja**  
**BKPSDM Kabupaten Berau**  
**Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	17.388.829.100,-	15.515.815.651,-	89,23
2	Belanja Tidak Langsung	7.982.431.016,-	7.468.462.670,-	93,56
	<b>Jumlah</b>	<b>25.371.260.116,-</b>	<b>22.984.278.321,-</b>	<b>90,59</b>

### 3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Anggaran per Sasaran Strategis**  
**BKPSDM Kabupaten Berau**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	12.550.314.800,-	11.391.843.884,-	90,77
2.	Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	1.255.492.000,-	1.065.421.613,-	84,90
3.	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	515.328.000,-	507.956.992,-	98,57

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis

Laporan Akuntabilitas menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan, capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

**Tabel III.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	TW I	-	-	-
					TW II	-	-	-
					TW III	-	-	-
					TW IV	1	1	100
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS	Dokumen	2440	TW I	-	-	-
					TW II	-	-	-

		dan PPPK			TWIII	-	-	-
					TW IV	2440	2349	96,27
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	380	Tw I	280	280	100
					TW II	66	60	90,90
					TWIII	10	9	90
					TW IV	24	24	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	TW I	2	2	100
					TW II	3	3	100
					TWIII	3	3	100
					TW IV	-	-	-
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	TW I	-	-	-
					TW II	-	-	-
					TWIII	-	-	-
					TW IV	50	57	114
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	10	TW I	-	-	-
					TW II	3	3	100
					TWIII	2	1	50
					TW IV	5	5	100
		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	432	TW I	110	110	100
					TW II	254	254	100
					TWIII	68	65	95,59
					TW IV	-	-	-
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	1288	TW I	1179	1179	100
					TW II	-	-	-
					TWIII	-	-	-
					TW IV	109	60	55,04
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Laporan	2058	TW I	389	389	100
					TW II	439	439	100
					TWIII	1047	1165	111,27

		Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan			TW IV	183	183	100
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	47	TW I	-	-	-
					TW II	-	-	-
					TWIII	47	45	95,74
					TW IV	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	230	TW I	92	92	100
					TW II	45	45	100
					TWIII	63	63	100
					TW IV	30	30	100
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	200	TW I	52	50	96,15
					TW II	53	50	94,34
					TWIII	-	-	-
					TW IV	95	90	94,74
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	15	TW I	4	2	50
					TW II	-	-	-
					TWIII	4	1	25
TW IV	7				4	57,14		
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	15	TW I	5	5	100		
			TW II	2	2	100		
			TWIII	3	3	100		
			TW IV	5	5	100		
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	47	TW I	-	-	-		
			TW II	-	-	-		
			TWIII	-	-	-		
			TW IV	47	45	95,74		
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	170	TW I	43	43	100
					TW II	45	45	100
					TWIII	57	57	100

					TW IV	25	25	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5500	TW I	1186	1374	115,85
					TW II	1210	1400	115,70
					TWIII	1163	1351	116,17
					TW IV	1941	2129	109,69
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	100	TW I	22	41	186,36
					TW II	42	81	192,86
					TWIII	17	29	170,59
					TW IV	19	37	194,74
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1200	TW I	220	220	100
					TW II	468	468	100
					TWIII	438	438	100
					TW IV	74	74	100

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi				Ket.
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.050.125.316,-	2.204.643.017,-	2.540.118.852,-	2.119.068.690,-	3.274.353.469,-	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.147.046.800,-	293.310.740,-	968.182.164,-	1.058.666.013,-	3.241.387.797,-	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.174.088.000,-	842.845.084,-	1.731.443.944,-	1.450.613.327,-	3.370.332.420,-	

**B. Analisis Capaian Kinerja**

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.2  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	100
2.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2440	2349	96,27
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	380	373	98,16
4.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	8	100
5.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	57	114
6.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	10	9	90
7.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	432	429	99,31
8.	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	1288	1239	96,20
9.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	2058	2176	105,73

Sasaran 2 : Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.3  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	47	45	95,74
2.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	230	230	100
3.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	200	190	95
4.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	Laporan	15	7	46,67

	Pelanggaran Disiplin ASN				
5.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	15	15	100
6.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	47	45	95,74

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.4  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	170	170	100
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5500	6254	113,71
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	100	188	188
4.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1200	1200	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.5  
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	Peningkatan 100%
2.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1315	2349	Peningkatan 78,63%
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	738	373	Penurunan 49,46%
4.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	9	8	Penurunan 11,11%
5.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	57	Peningkatan 100%
6.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	7	9	Peningkatan 128,57%
7.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	532	429	Penurunan 19,36%
8.	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	32	1239	Peningkatan 3771,88%
9.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Laporan	532	2176	Peningkatan 309,02%

	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan				
--	--	--	--	--	--

Sasaran 2 : Meningkatkan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.6

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	47	45	Penurunan 4,25%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	212	230	Peningkatan 8,5%
3.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	0	190	Peningkatan 100%
4.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	4	7	Penurunan 175%
5.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	13	15	Penurunan 115,38%
6.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	47	45	Penurunan 4,25%

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.7

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	155	170	Peningkatan 9,68%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4716	6254	Peningkatan 32,61%
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	27	188	Peningkatan 596,30%
4.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2180	1200	Peningkatan 44,95%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur

Tabel III.8  
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	100%
2.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	500	2349	369,8%
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	500	373	25,4%
4.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	8	100%
5.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	57	100%
6.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	25	9	64%
7.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	60	429	615%
8.	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	30	1239	4430%
9.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	1000	2176	117,6%

Sasaran 2 : Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tabel III.9  
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	30	45	50%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	250	230	8%
3.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	47	190	304,25%

4.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	7	58,33%
5.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	7	15	214,29%
6.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	-	45	100%

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Informasi Kepegawaian

Tabel III.10  
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	155	170	9,68%
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6000	6254	4,23%
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	250	188	24,8%
4.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	900	1200	33,33%

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau pada Tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Kualitas Kinerja SDM Aparatur yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu :
  1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  2. Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
  3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
  4. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN

5. Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya
6. Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
7. Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
8. Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
9. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Dari sasaran I diatas terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dan Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal :

1. Seleksi PPPK Tahap II penjadwalan mundur ke tahun 2025
2. Belum dimilikinya dokumen rencana kebutuhan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Program Studi pendidikan lanjutan tidak sesuai dengan rumpun jabatan yang diampu oleh pemohon tugas belajar.
4. Masih adanya intervensi dari pihak tidak berwenang dalam pemberian penugasan tugas belajar pembiayaan APBD.
5. Kurangnya pemahaman Pegawai Negeri Sipil tentang Tugas Belajar.
6. Jadwal masuk perkuliahan penerima Tugas Belajar mundur ke tahun 2025, sehingga Beasiswa tidak bisa dibayarkan di tahun anggaran 2024

7. Tidak adanya pelaksanaan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, dikarenakan adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak.
8. Sejumlah peserta yang telah dilakukan pemanggilan untuk mengikuti penilaian kompetensi dan potensi tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga jumlah peserta yang menjadi target capaian tidak terpenuhi dan terdapat perubahan pembayaran honorarium tim yang tidak dapat dibayarkan lagi berdasarkan jam pelajaran (JP) dikarenakan telah menggunakan pola kontribusi PNBK  
Adapun solusi terhadap hambatan tersebut, yaitu :
  1. Kegiatan Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II akan dilaksanakan sesuai penjadwalan dari Badan Kepegawaian Nasional di Tahun 2025
  2. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perguruan tinggi agar dapat menambah referensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan peningkatan pendidikan sesuai dengan jabatan yang diampunya.
  3. Membuat regulasi yang jelas terkait pendanaan tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mulai dari kriteria penerima, jumlah dana sampai dengan komponen-komponen pembiayaan.
  4. Melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang tugas belajar melalui berbagai media.
  5. Menyiapkan daftar nominatif penerima Tugas Belajar lebih dari target, apabila terdapat penerima Tugas Belajar yang tidak tepat waktu memulai perkuliahannya dapat digantikan nominatif selanjutnya.
  6. Melaksanakan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku
  7. Membuat sosialisasi tentang pentingnya penilaian kompetensi dan potensi yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah agar tidak

memberikan penugasan lain kepada calon peserta dan memastikan kehadiran peserta tersebut sesuai jadwal.

- Sasaran II : Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu :
  1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  2. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
  3. Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
  4. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  5. Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani
  6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN

Dari sasaran II tersebut semua indikator mencapai target yang telah ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani, yang menggunakan rumus semakin rendah realisasi semakin tinggi kinerjanya.

- Sasaran III : Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
  1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
  3. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
  4. Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Dari sasaran III tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian yang realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Adanya penambahan ASN baru pada tahun 2024 dan pada saat penginputan RKA perubahan tidak dilakukan penyesuaian target capaian.

2. Adanya penambahan output capaian dari sub kegiatan dan tidak dilakukan penyesuaian target

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mencermati setiap tahapan penyusunan dokumen penganggaran dan melakukan penyesuaian target.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.11  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur</b>			
1.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100	99,80	99,8
1.2	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	96,27	96,56	99,70
1.3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	98,16	86,55	113,41
1.4	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100	81,62	122,51
1.5	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	114	93,90	121,40
1.6	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	90	84,76	106,18
1.7	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	99,31	90,52	109,71
1.8	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	96,20	71,78	134,02
1.9	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	105,73	93,08	113,59
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau</b>			
2.1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95,74	85,72	111,69
2.2	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	100	94,83	105,45
2.3	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	95	76,64	123,96
2.4	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	46,67	97,59	47,82
2.5	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	100	97,77	102,28
2.6	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	95,74	93,19	102,74
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian</b>			
3.1	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi	100	97,90	102,14

	Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
3.2	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	113,71	92,32	123,17
3.3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	188	97,64	192,54
3.4	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100	99,99	100,01

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target kinerja, berikut adalah penyajian data program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.12  
Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,69	0,14	20,29	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional		90,74	100	110,20	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
			Pengelolaan Mutasi ASN				
			Pengelolaan Promosi ASN				
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota					
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN		0,29	0,43	148,28	
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				

	Kabupaten Berau		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			
			Pembinaan Disiplin ASN			
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			
			Evaluasi Pembinaan Disiplin			
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan		90	100	111,11
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				
		Pengelolaan Data Kepegawaian				
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				

### C. Realisasi Anggaran

#### 1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel III.13  
Realisasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	0,69 90,74	0,14 100	20,29 110,20	12.550.314.800,-	11.391.843.884,-	90,77
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	0,29	0,43	148,28	1.255.492.000,-	1.065.421.613,-	84,90
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	90	100	111,11	515.328.000,-	507.956.992,-	98,57

#### 2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Tabel III.14  
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan  
BKPSDM Kabupaten Berau  
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.050.125.316,-	10.138.184.028,-	91,75	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	772.518.400,-	555.338.814,-	71,89	

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.993.431.016,-	8.429.986.404,-	93,73	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.750.000,-	217.600.526,-	95,96	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.880.600,-	514.224.503,-	91,19	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.067.200,-	105.288.627,-	93,95	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.470.100,-	181.855.379,-	84,01	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.008.000,-	133.889.775,-	81,14	
<b>2</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>6.147.046.800,-</b>	<b>5.562.987.714,-</b>	<b>90,50</b>	
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.180.865.200,-	2.111.463.136,-	96,82	
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	941.749.000,-	817.792.894,-	86,84	
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	1.768.940.600,-	1.575.310.071,-	89,05	
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.255.492.000,-	1.065.421.613,-	84,86	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.174.088.000,-</b>	<b>7.395.234.775,-</b>	<b>90,47</b>	
3.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	8.174.088.000,-	7.395.234.775,-	90,47	

Penyerapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 mencapai 90,59 % atau sebesar Rp 22.984.278.321,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 25.371.260.116,-

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 melalui bidang-bidang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilakukan sebagai upaya pencapaian target kinerja pada Tahun 2024 :

- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau





- Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024





- Pemutakhiran data ASN Tahun 2024



- Penyerahan SK Kenaikan Pangkat



- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional



- Pelaksanaan Tahapan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



- Pelaksanaan Tahapan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Administrator



- Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau





- Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP)



- Pelatihan Bendahara BOSDA



- Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II



- Pelatihan Teknis Coaching dan Mentoring Angkatan I Tahun 2024



- Sosialisasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)



- Penggalian data AKPK ke Perangkat Daerah





- Sosialisasi Peraturan di Bidang Kepegawaian



- Sosialisasi Netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024



- Layanan Kepegawaian





- Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja melalui Aplikasi E-Kinerja Tahun 2024



- Pelaksanaan Upacara HUT KORPRI ke - 53 Tahun 2024



- Penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun







- Koordinasi terkait penyelesaian Tunjangan Hari Tua dan Gaji Pensiun PNS yang memasuki Pensiun



- Kepala BKPSDM Kabupaten Berau menerima penghargaan Indeks Sistem Merit dengan Kategori Baik Tahun 2024





**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau ini di susun sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kepegawaian yang melibatkan stakeholders, sehingga tercipta pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Sebagai wujud upaya penguatan akuntabilitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang

merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi. Untuk itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator kinerja utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana capaian kinerja sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Berau



Hj. Sri Eka Takariyati, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1965112 1994 03 2 008

# LAMPIRAN



# CASCADING

## TAHUN 2024

*BABAN KEPEDAGOGIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAH*



**RAH TER**  
DITUSAN KENAIKANN  
TAHUN 2024  
KABUPATEN BERAH













Perjanjian Kinerja Bupati				Perjanjian Kinerja Eselon II				Perjanjian Kinerja Eselon III				Perjanjian Kinerja Eselon IV/ Fungsional				Perjanjian Kinerja Non-Eselon												
No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja (Output)	Satuan	Target	Pemangung Jawab	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pemangung Jawab	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pemangung Jawab		
				</																								





**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., M.M**  
Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HLJ. SRI JUNIARSIH, MAB, M.Pd**

Jabatan : **BUPATI BERAU**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian dari perjanjian

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau dapat menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu wujud dan pertanggung jawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau kepada pemberi mandat.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau.

Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau kepada pemberi mandat, serta untuk mewujudkan VISI dan MISI Bupati melalui perumusan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

**"MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN  
BERAU YANG KOMPETEN, BERDAYA SAING, PROFESIONAL DAN  
BERINTEGRITAS TINGGI"**

Demikian Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau Tahun 2024 ini kami susun semoga memberikan manfaat, apabila dalam penyusunan ini ada kesalahan maupun kekurangan mohon, tanggapan, saran dan masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 8 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Berau

HI. ERIKA TAKARIYATI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196512121994032008

**PELAKSIAN BENCANA (PB)  
 BAHAN KEPEKERJAAN PERENCANAAN DAN PELAKSIAN KABUPATEN BOJONEgara  
 TAHUN 2024**

NO	Resource Strategy	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja KDM Aparatur	Perentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Perentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural/ fungsional	100% 95,74
2	Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegara	Perentase pemrosesan pengaduan disiplin ASN	100%
3	Meningkatnya budaya pelayanan masyarakat	Perentase data kepengawasan yang terungkap/terbaca	100

**PROGRAM**

**ALOKASIKAN**

<b>A. PROGRAM PELAYANAN GABUNG PEMBERANTARAN DAERAH KABUPATEN/BOJONEGERA</b>	<b>Rp 2.876.222.414</b>
1. Kegiatan Pemrosesan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 100.000.000
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.200.000.000
3. Kegiatan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Rp 100.000.000
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 200.000.000
5. Kegiatan Bering Monev Daerah Peningkat Utama Pemerintahan Daerah	Rp 100.000.000
6. Kegiatan Pemeliharaan Jasa Peningkat Utama Pemerintahan Daerah	Rp 100.000.000
7. Kegiatan Pemeliharaan Bering Monev Daerah Peningkat Utama Pemerintahan Daerah	Rp 100.000.000
<b>B. PROGRAM KEPEKERJAAN DAERAH</b>	<b>Rp 2.871.975.000</b>
8. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 670.000.000
9. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp 700.000.000
10. Kegiatan Pengembangan Kepegawaian ASN	Rp 1.200.000.000
11. Kegiatan Pendidikan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 1.000.000.000
<b>C. PROGRAM PERDEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Rp 5.822.425.000</b>
12. Pelaksanaan Pendidikan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Rp 100.000.000
13. Pendidikan, Kelembagaan, Pengembangan Kepegawaian Masyarakat dan Pengawasan	Rp 5.822.425.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18.876.798.014</b>

Tanjung Pura, 10 Januari 2024  
 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
 Kabupaten Bojonegara

**EL. HSI HSA TANASTATI, S.P., M.M**  
 PEMBERANTARAN BOJONEGERA  
 NIP. 19681212 199403 2 008

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 8 Januari 2024

**PIRAK KEDUA,**

**BUPATI BERAU**



**HJ. SRI JUNIASRI, MAS, M.Pd**

**PIRAK PERTAMA,**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU**



**HJ. SRI ERA TAKARYATI, S.H., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651212 199403 2 008

**LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BERAU**  
**TAHUN 2024**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Satuan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023	
		K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2	3	7			8		9		10		11		12		13	
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU</b>		<b>25.371.260.116</b>			<b>3.340.798.841</b>		<b>5.248.185.960</b>		<b>4.628.348.030</b>		<b>9.886.073.686</b>		<b>23.103.406.517</b>	<b>214,33</b>	<b>91,06</b>
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>11.050.125.316</b>			<b>2.204.643.017</b>		<b>2.540.118.852</b>		<b>2.119.068.690</b>		<b>3.274.353.469</b>		<b>10.032.117.262</b>	<b>91,44</b>	<b>82,96</b>
5 03 01 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<b>772.518.400</b>			<b>13.252.000</b>		<b>25.785.815</b>		<b>104.154.124</b>		<b>412.146.875</b>		<b>555.338.814</b>		
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	60.468.000	Dokumen	5	3.304.000	3	2.606.000	2	5.531.000	2	32.424.386	12	43.865.386	100,00	72,54
	06 Koordinasi dan Penyusunan :Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	45.000.000	Laporan	5	818.000	2	2.150.000	1	1.200.000	2	31.610.380	2	35.778.380	20,00	79,51
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	667.050.400	Laporan	-	9.130.000	6	21.029.815	3	97.423.124	3	348.112.109	12	475.695.048	100,00	71,31
5 03 01 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<b>8.993.431.016</b>			<b>2.055.617.801</b>		<b>2.328.495.807</b>		<b>1.827.820.631</b>		<b>2.218.052.165</b>		<b>8.429.986.404</b>		
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	700	7.275.599.016	Orang/Bulan	200	1.655.240.621	200	1.945.087.109	150	1.455.085.728	150	1.770.999.012	700	6.826.412.470	100,00	93,83
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.532.400.000	Dokumen	3	400.377.180	3	347.558.698	3	336.884.903	3	338.943.153	12	1.423.763.934	100,00	92,91
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	12	185.432.000	Dokumen	-	-	3	35.850.000	6	35.850.000	3	108.110.000	12	179.810.000	100,00	96,97
5 03 01 2.02	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<b>226.750.000</b>			<b>7.000.000</b>		<b>41.253.066</b>		<b>42.093.760</b>		<b>127.253.700</b>		<b>111.533.760</b>		
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	133	111.750.000	Paket	-	-	-	-	53	39.533.760	80	72.000.000	133	111.533.760	100,00	99,81
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	115.000.000	Orang	2	7.000.000	2	41.253.066	1	2.560.000	8	55.253.700	13	106.066.766	108,33	92,23
5 03 01 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<b>563.880.600</b>			<b>48.730.578</b>		<b>87.498.529</b>		<b>58.007.000</b>		<b>319.988.396</b>		<b>514.224.503</b>		
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	12	4.638.000	Paket	-	-	6	2.045.000	3	495.000	3	2.004.000	12	4.544.000	100,00	97,97
	02 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	12	251.472.800	Paket	-	-	6	28.877.000	3	41.432.400	3	167.721.000	12	238.030.400	100,00	94,65
	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	23.919.800	Paket	-	-	6	1.999.000	3	750.000	3	16.600.000	12	19.349.000	100,00	80,89
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	51.700.000	Paket	3	5.745.000	3	3.317.000	3	8.216.800	3	26.932.600	12	44.211.400	100,00	85,52
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	7.150.000	Paket	3	150.000	3	385.000	3	2.170.000	3	775.000	12	3.480.000	100,00	48,67
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	5.000.000	Dokumen	-	-	6	1.215.000	-	-	6	2.025.000	12	3.240.000	100,00	64,80
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	220.000.000	Laporan	3	42.835.578	3	49.660.529	3	4.942.800	3	103.930.796	12	201.369.703	100,00	91,53
5 03 01 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<b>112.067.200</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>41.038.627</b>		<b>64.250.000</b>		<b>105.288.627</b>		
	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	22.000.000	Unit	-	-	-	-	1	20.938.627	-	-	1	20.938.627	100,00	95,18
	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14	90.067.200	Unit	-	-	-	-	1	20.100.000	13	64.250.000	14	84.350.000	100,00	93,65

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Satuan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023	
		K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2	3	7		8	9		10		11		12		13			
5 03 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan daerah</b>		<b>216.470.100</b>			<b>54.245.038</b>	-	<b>33.200.135</b>	-	<b>33.963.723</b>	-	<b>60.446.483</b>		<b>181.855.379</b>		
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.000.000	Laporan	-	-	-	-	-	-	1	960.000	1	960.000	8,33	32,00
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	169.968.700	Laporan	3	48.713.038	3	26.356.535	3	32.018.723	3	36.794.583	12	143.882.879	100,00	84,65
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12.988.000	Laporan	3	4.500.000	-	-	3	1.500.000	3	6.660.000	9	12.660.000	75,00	97,47
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	30.513.400	Laporan	3	1.032.000	3	6.843.600	3	445.000	3	16.031.900	12	24.352.500	100,00	79,81
5 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>		<b>165.008.000</b>			<b>25.797.600</b>		<b>23.885.500</b>		<b>11.990.825</b>		<b>72.215.850</b>		<b>133.889.775</b>		
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	134.945.000	Unit	3	25.797.600	3	23.885.500	3	11.990.825	3	45.075.850	12	106.749.775	100,00	79,11
	09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	30.063.000	Unit	-	-	-	-	-	-	1	27.140.000	1	27.140.000	50,00	90,28
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>6.147.046.800</b>	-		<b>293.310.740</b>		<b>976.623.164</b>		<b>1.058.666.013</b>		<b>3.241.387.797</b>		<b>5.569.987.714</b>	<b>303,76</b>	<b>92,54</b>
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>2.180.865.200</b>			<b>114.337.700</b>		<b>180.474.676</b>		<b>398.927.251</b>		<b>1.417.723.509</b>		<b>2.111.463.136</b>		<b>96,82</b>
	02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	75.000.000	Dokumen	-	6.255.000	-	27.345.000	-	26.030.000	1	15.220.000	1	74.850.000	100,00	99,80
	03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	600	1.799.917.200	Dokumen	-	57.858.080	-	112.810.856	-	319.587.834	2.349	1.247.752.131	2.349	1.738.008.901	391,50	96,56
	06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	170	85.000.000	Dokumen	43	25.637.909	45	15.762.940	57	3.540.000	25	38.278.123	170	83.218.972	100,00	97,90
	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5500	110.948.000	Dokumen	1.374	6.952.050	1.400	16.114.880	1.351	32.876.030	2.129	52.035.860	6.254	107.978.820	113,71	97,32
	11 Pengelolaan Data Kepegawaian	100	110.000.000	Dokumen	41	17.634.661	81	8.441.000	29	16.893.387	37	64.437.395	188	107.406.443	188,00	97,64
5 03 02 2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>941.749.000</b>	-		<b>74.149.475</b>		<b>286.444.374</b>		<b>205.138.595</b>		<b>252.060.450</b>		<b>817.792.894</b>		
	01 Pengelolaan Mutasi ASN	250	216.629.000	Dokumen	280	29.908.205	60	69.983.394	9	34.426.000	24	53.180.329	373	187.497.928	149,20	86,55
	02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	209.380.000	Dokumen	220	23.777.445	468	64.223.371	438	30.074.000	74	91.277.941	1.200	209.352.757	120,00	99,99
	03 Pengelolaan Promosi ASN	3	515.740.000	Dokumen	2	20.463.825	3	152.237.609	3	140.638.595	-	107.602.180	8	420.942.209	266,67	81,62
5 03 02 2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>1.768.940.600</b>	-		<b>46.730.414</b>		<b>372.100.786</b>		<b>298.535.106</b>		<b>857.943.765</b>		<b>1.575.310.071</b>		
	01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	50	433.594.000	Orang	-	1.400.000	-	9.618.162	-	9.696.000	57	386.433.575	57	407.147.737	114,00	93,90
	04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	8	704.998.600	Orang	-	-	3	168.998.713	1	85.910.524	5	342.654.055	9	597.563.292	112,50	84,76
	14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15	630.348.000	Orang	110	45.330.414	254	193.483.911	65	202.928.582	-	128.856.135	429	570.599.042	2.860,00	90,52
5 03 02 2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>1.255.492.000</b>	-		<b>58.093.151</b>		<b>137.603.328</b>		<b>156.065.061</b>		<b>713.660.073</b>		<b>1.065.421.613</b>		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Satuan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023			
		K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
2	3	7		8	9		10		11		12		13					
	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	47	244.536.000	Dokumen	-	19.382.680	-	22.450.380	45	28.513.140	-	140.752.304	45	211.098.504	95,74	86,33	
	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	230	106.700.000	Dokumen	92	-	45	16.447.200	63	16.141.428	-	68.590.664	200	101.179.292	86,96	94,83	
	07	Pembinaan Disiplin ASN	200	625.016.000	Orang	50	12.473.520	-	69.675.108	-	51.440.000	47	350.958.482	97	484.547.110	48,50	77,53	
	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15	112.120.000	Laporan	2	20.097.193	-	9.864.380	1	16.740.680	-	62.715.792	3	109.418.045	20,00	97,59	
	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15	75.000.000	Dokumen	5	-	2	5.379.000	3	20.030.103	4	47.921.970	14	73.331.073	93,33	97,77	
	10	Evaluasi Disiplin ASN	47	92.120.000	Laporan	-	6.139.758	1	13.787.260	-	23.199.710	46	42.720.861	47	85.847.589	100,00	93,19	
5	03	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.174.088.000</b>	-	<b>842.845.084</b>	<b>1.731.443.944</b>		<b>1.450.613.327</b>	<b>3.370.332.420</b>	<b>7.395.234.775</b>	<b>247,80</b>	<b>71,78</b>					
5	03	02	2.01 <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>8.174.088.000</b>		<b>842.845.084</b>	<b>1.731.443.944</b>		<b>1.450.613.327</b>	<b>3.370.332.420</b>	<b>7.395.234.775</b>							
		03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	500	1.000.484.000	Orang	1.179	368.933.409	-	65.699.700	-	60	283.523.499	1.239	718.156.608	247,80	71,78	
		07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1200	7.173.604.000	Orang	389	473.911.675	439	1.665.744.244	1.165	1.450.613.327	183	3.086.808.921	2.176	6.677.078.167	181,33	93,08
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>25.371.260.116</b>			<b>3.340.798.841</b>		<b>5.248.185.960</b>		<b>4.628.348.030</b>		<b>9.886.073.686</b>		<b>23.103.406.517</b>	<b>214,33</b>	<b>91,06</b>	

Tanjung Redeb, 31 Desember 2024

KEPALA BKPSDM KABUPATEN BERAU

**Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651212 199403 2 008

## PENGUKURAN KINERJA ESELON II

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Penzadaan ASN	Dokumen	1	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	1	1	100
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2440	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	2440	2349	96,27
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	380	Triwulan I	280	280	100,00
					Triwulan II	66	60	90,91
					Triwulan III	10	9	90,00
					Triwulan IV	24	24	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	Triwulan I	2	2	100
					Triwulan II	3	3	100
					Triwulan III	3	3	100
					Triwulan IV	0	0	0
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	50	57	114
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	10	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	3	3	100
					Triwulan III	2	1	50
					Triwulan IV	5	5	100
Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	432	Triwulan I	110	110	100		
			Triwulan II	254	254	100		
			Triwulan III	68	65	95,59		
			Triwulan IV	0	0	0		
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	1288	Triwulan I	1179	1179	100		
			Triwulan II	0	0	0		
			Triwulan III	0	0	0		
			Triwulan IV	109	60	55,05		

		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan	Laporan	2058	Triwulan I	389	389	100
					Triwulan II	439	439	100
					Triwulan III	1047	1165	111,27
					Triwulan IV	183	183	100
2.	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	47	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	47	45	95,74
					Triwulan IV	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	230	Triwulan I	92	92	100
					Triwulan II	45	45	100
					Triwulan III	63	63	100
					Triwulan IV	30	30	100
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	200	Triwulan I	52	50	96,15
					Triwulan II	53	50	94,34
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	95	90	94,74
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	15	Triwulan I	4	2	50
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	4	1	25
					Triwulan IV	7	4	57,14
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani	Dokumen	15	Triwulan I	5	5	100
					Triwulan II	2	2	100
					Triwulan III	3	3	100
					Triwulan IV	5	5	100
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	47	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	47	45	95,74
3.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	170	Triwulan I	43	43	100
					Triwulan II	45	45	100
					Triwulan III	57	57	100
					Triwulan IV	25	25	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5500	Triwulan I	1186	1374	115,85
					Triwulan II	1210	1400	115,70
					Triwulan III	1163	1351	116,17
					Triwulan IV	1941	2129	109,69
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	100	Triwulan I	22	41	186,36
					Triwulan II	42	81	192,86
					Triwulan III	17	29	170,59
					Triwulan IV	19	37	194,74

		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1200	Triwulan I	220	220	100
					Triwulan II	468	468	100
					Triwulan III	438	438	100
					Triwulan IV	74	74	100

NO	Program	Anggaran	Realisasi				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.050.125.316	Rp 2.204.643.017	Rp 2.540.118.852	Rp 2.119.068.690	Rp 3.274.353.469	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 6.147.046.800,00	Rp 293.310.740	Rp 968.182.164	Rp 1.058.666.013	Rp 3.241.387.797	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 8.174.088.000,00	Rp 842.845.084	Rp 1.731.443.944	Rp 1.450.613.327	Rp 3.370.332.420	

Tanjung Redeb, 31 Desember 2024

Kepala BKPSDM Kabupaten Berau



HJ. Sri Eka Takaryati, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 199403 2 008





**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
Jl. Mawar No. 5 Telp / Fax (0554) 21406  
TANJUNG REDEB

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BERAU**

**NOMOR : 1221 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BERAU 2016-2021**

**KEPALA BKPP KABUPATEN BERAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau perlu menetapkan indikator kinerja;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan tentang penetapan indikator kinerja utama (key performance indicators) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 073 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau untuk menyusun :

- a. Rencana Kinerja Tahunan,
- b. Rencana Kerja dan Anggaran,
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK),
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TanjungRedeb  
Pada tanggal, : 11 Nopember 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BERAU**



**MUHAMMAD SAID S.H., M.H**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790723 200212 1 001

Lampiran  
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau  
Nomor : 1221 Tahun 2021  
Tanggal : 11 Nopember 2021  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BERAU  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
TAHUN 2021-2026**

Instansi : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau  
Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan UPTB;
6. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6						8	9
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Berau yang Kompeten, berdaya saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar -----X 100 Jumlah ASN	0,39	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	Rekapitulasi jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	Bidang Pengembangan Aparatur
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural / fungsional	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat + Jumlah ASN yang akan pensiun -----X 100 Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional	78,5 9	82,6 3	86,6 9	90,7 4	94,7 9	98,8 4	Rekapitulasi Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat	Bidang Pengembangan Aparatur
		Meningkatkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	(Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun lalu- Jumlah pelanggaran disiplin /kasus hukum tahun ini) -----X 100 Jumlah pelanggaran disiplin/kasus tahun lalu	0,4	0,37	0,35	0,29	0,2	0,09	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin	Bidang Pembinaan Aparatur
		Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	Jumlah data ASN yang diupdate -----X 100 Jumlah ASN	90	90	90	90	90	90	Rekapitulasi Data kepegawaian yang terupdate	Bidang Mutasi Aparatur

**Tanjung Redeb, 11 Nopember 2021**  
**Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kabupaten Berau**



**MUHAMMAD SAID, S.H., M.H**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 19790723 200212 1 001**

**RENCANA AKSI (ANGGARAN PERUBAHAN) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis					Program dan Kegiatan/sub Kegiatan							Anggaran Program dan Kegiatan	Target		Penanggung jawab	
	Uraian	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target		Uraian	Indikator Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target			Triwulan (Tw)	Target		
				Triwulan (Tw)	Target						Triwulan (Tw)	Target					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja								
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					Rp 60.468.000	Tw 1	Rp 24.187.200	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
													Tw 2		Rp 18.140.400		
													Tw 3		Rp 12.093.600		
													Tw 4		Rp 6.046.800		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					Rp 45.000.000	Tw 1	Rp 18.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
													Tw 2		Rp 13.500.000		
													Tw 3		Rp 9.000.000		
													Tw 4		Rp 4.500.000		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					Rp 667.050.400	Tw 1	Rp 266.820.160	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
													Tw 2		Rp 200.115.120		
													Tw 3		Rp 133.410.080		
													Tw 4		Rp 66.705.040		
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Keuangan Perangkat Daerah								
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Orang/Bulan				Rp 7.275.599.016	Tw 1	Rp 2.910.239.606	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
												Tw 2		Rp 2.182.679.705			
												Tw 3		Rp 1.455.119.803			
												Tw 4		Rp 727.559.902			
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				Rp 1.532.400.000	Tw 1	Rp 612.960.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
												Tw 2		Rp 459.720.000			
												Tw 3		Rp 306.480.000			
												Tw 4		Rp 153.240.000			
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				Rp 185.432.000	Tw 1	Rp 74.172.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
												Tw 2		Rp 55.629.600			
												Tw 3		Rp 37.086.400			
												Tw 4		Rp 18.543.200			

							<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah							
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Tw 1	0	Rp 111.750.000	Tw 1	Rp 44.700.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	60		Tw 2	Rp 33.525.000	
										Tw 3	0		Tw 3	Rp 22.350.000	
										Tw 4	0		Tw 4	Rp 11.175.000	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	Tw 1	3	Rp 115.000.000	Tw 1	Rp 46.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	6		Tw 2	Rp 34.500.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 23.000.000	
										Tw 4	0		Tw 4	Rp 11.500.000	
							<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dan Pelaksanaan Kegiatan							
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 4.638.000	Tw 1	Rp 1.855.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 1.391.400	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 927.600	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 463.800	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 251.472.800	Tw 1	Rp 100.589.120	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 75.441.840	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 50.294.560	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 25.147.280	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 23.919.800	Tw 1	Rp 9.567.920	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 7.175.940	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 4.783.960	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 2.391.980	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 51.700.000	Tw 1	Rp 20.680.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 15.510.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 10.340.000	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 5.170.000	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Tw 1	3	Rp 7.150.000	Tw 1	Rp 2.860.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 2.145.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 1.430.000	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 715.000	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	Tw 1	3	Rp 5.000.000	Tw 1	Rp 2.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 1.500.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 1.000.000	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 500.000	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tw 1	3	Rp 220.000.000	Tw 1	Rp 88.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
										Tw 2	3		Tw 2	Rp 66.000.000	
										Tw 3	3		Tw 3	Rp 44.000.000	
										Tw 4	3		Tw 4	Rp 22.000.000	



						<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	<b>Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Jumlah pemenuhan kebutuhan sesuai formasi dan jumlah data kepegawaian yang diupdate									
								Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Tw 1	0	Rp	75.000.000	Tw 1	Rp	30.000.000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	0		Tw 2	Rp	22.500.000		
											Tw 3	0		Tw 3	Rp	15.000.000		
											Tw 4	1		Tw 4	Rp	7.500.000		
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Tw 1	0	Rp	1.799.917.200	Tw 1	Rp	719.966.880	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	0		Tw 2	Rp	539.975.160		
											Tw 3	0		Tw 3	Rp	359.983.440		
											Tw 4	2440		Tw 4	Rp	179.991.720		
								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Orang	Tw 1	43	Rp	85.000.000	Tw 1	Rp	34.000.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
											Tw 2	45		Tw 2	Rp	25.500.000		
											Tw 3	57		Tw 3	Rp	17.000.000		
											Tw 4	25		Tw 4	Rp	8.500.000		
1	<b>Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian</b>	Persentase data kepegawaian yang terupdate/terbarukan	Orang	Tw 1	2000			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Tw 1	1186	Rp	110.948.000	Tw 1	Rp	44.379.200	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
				Tw 2	1500						Tw 2	1210		Tw 2	Rp	33.284.400		
				Tw 3	1000						Tw 3	1163		Tw 3	Rp	22.189.600		
				Tw 4	500						Tw 4	1941		Tw 4	Rp	11.094.800		
								Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Tw 1	22	Rp	110.000.000	Tw 1	Rp	44.000.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
											Tw 2	42		Tw 2	Rp	33.000.000		
											Tw 3	17		Tw 3	Rp	22.000.000		
											Tw 4	19		Tw 4	Rp	11.000.000		
								<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Jumlah ASN yang terlayani dalam pengurusan mutasi dan kepangkatan serta kesesuaian jabatan dengan									
								Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Tw 1	280	Rp	216.629.000	Tw 1	Rp	86.651.600	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	66		Tw 2	Rp	64.988.700		
											Tw 3	10		Tw 3	Rp	43.325.800		
											Tw 4	24		Tw 4	Rp	21.662.900		
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Tw 1	220	Rp	209.380.000	Tw 1	Rp	83.752.000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	468		Tw 2	Rp	62.814.000		
											Tw 3	438		Tw 3	Rp	41.876.000		
											Tw 4	74		Tw 4	Rp	20.938.000		
								Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Tw 1	2	Rp	515.740.000	Tw 1	Rp	206.296.000	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi ASN
											Tw 2	3		Tw 2	Rp	154.722.000		
											Tw 3	3		Tw 3	Rp	103.148.000		
											Tw 4	0		Tw 4	Rp	51.574.000		

								<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi								
2	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur</b>	Jumlah ASN yang menduduki jabatan dan telah mengikuti serta lulus DIKLATPIM	Orang	Tw 1	0			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	Orang	Tw 1	0	Rp 433.594.000	Tw 1	Rp 173.437.600	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN	
				Tw 2	2						Tw 2	Rp 130.078.200					
				Tw 3	4						Tw 3	Rp 86.718.800					
				Tw 4	4						Tw 4	Rp 43.359.400					
	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur</b>	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	Tw 1	50			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Tw 1	0	Rp 704.998.600	Tw 1	Rp 281.999.440	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN	
				Tw 2	0						Tw 2	Rp 211.499.580					
				Tw 3	0						Tw 3	Rp 140.999.720					
				Tw 4	0						Tw 4	Rp 70.499.860					
							Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Tw 1	110	Rp 630.348.000	Tw 1	Rp 252.139.200	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN		
										Tw 2	254		Tw 2	Rp 189.104.400			
										Tw 3	68		Tw 3	Rp 126.069.600			
										Tw 4	0		Tw 4	Rp 63.034.800			
							<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Jumlah Dokumen									
							Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Tw 1	0	Rp 244.536.000	Tw 1	Rp 97.814.400	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN		
										Tw 2	0		Tw 2	Rp 73.360.800			
										Tw 3	47		Tw 3	Rp 48.907.200			
										Tw 4	0		Tw 4	Rp 24.453.600			
								Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	Tw 1	92	Rp 106.700.000	Tw 1	Rp 42.680.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN	
											Tw 2	45		Tw 2	Rp 32.010.000		
											Tw 3	63		Tw 3	Rp 21.340.000		
											Tw 4	30		Tw 4	Rp 10.670.000		
3	<b>Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau</b>	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	Perangkat Daerah	Tw 1	6			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Tw 1	52	Rp 625.016.000	Tw 1	Rp 250.006.400	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN	
				Tw 2	6						Tw 2	Rp 187.504.800					
				Tw 3	47						Tw 3	Rp 125.003.200					
				Tw 4	2						Tw 4	Rp 62.501.600					

		Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	SK	Tw 1	6			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Tw 1	4	Rp	112.120.000	Tw 1	Rp	44.848.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
				Tw 2	6						Tw 2	0			Tw 2	Rp	33.636.000	
				Tw 3	6						Tw 3	4			Tw 3	Rp	22.424.000	
				Tw 4	5						Tw 4	7			Tw 4	Rp	11.212.000	
								Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Dokumen	Tw 1	5	Rp	75.000.000	Tw 1	Rp	30.000.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
											Tw 2	2			Tw 2	Rp	22.500.000	
											Tw 3	3			Tw 3	Rp	15.000.000	
											Tw 4	5			Tw 4	Rp	7.500.000	
								Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	Tw 1	0	Rp	92.120.000	Tw 1	Rp	36.848.000	Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Penghargaan ASN
											Tw 2	0			Tw 2	Rp	27.636.000	
											Tw 3	0			Tw 3	Rp	18.424.000	
											Tw 4	47			Tw 4	Rp	9.212.000	
						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Jumlah ASN (JPT, JA yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan CPNS mengikuti Prajabatan)									
	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur</b>	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	Tw 1	233			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	Tw 1	1179	Rp	1.000.484.000	Tw 1	Rp	400.193.600	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
				Tw 2	280						Tw 2	0			Tw 2	Rp	300.145.200	
				Tw 3	210						Tw 3	0			Tw 3	Rp	200.096.800	
				Tw 4	210						Tw 4	109			Tw 4	Rp	100.048.400	
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	Tw 1	389	Rp	7.173.604.000	Tw 1	Rp	2.869.441.600	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
											Tw 2	439			Tw 2	Rp	2.152.081.200	
											Tw 3	1047			Tw 3	Rp	1.434.720.800	
											Tw 4	183			Tw 4	Rp	717.360.400	

Ket :

\* Pada kolom (14) diisi dengan KAS ANGGARAN pada DPA

Tanjung Redeb, 20 September 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BERAU,

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651212 199403 2 008

**REALISASI RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis						Program dan Kegiatan/sub Kegiatan								Anggaran Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi				Rencana Aksi	
	Uraian	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target dan Realisasi			Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi					Triwulan (Tw)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
				Triwulan (Tw)	Target	Realisasi					Capaian (%)	Triwulan (Tw)	Target	Realisasi							Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja													
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tw 1	3	5	166,67	Rp	60.468.000	Tw 1	Rp	24.187.200	Rp	3.304.000	13,66
										Tw 2	3	3	100,00			Tw 2	Rp	18.140.400	Rp	2.606.000	14,37
										Tw 3	3	2	66,67			Tw 3	Rp	12.093.600	Rp	5.531.000	45,73
										Tw 4	3	2	66,67			Tw 4	Rp	6.046.800	Rp	32.424.386	536,22
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tw 1	3	5	166,67	Rp	45.000.000	Tw 1	Rp	18.000.000	Rp	818.000	4,54
										Tw 2	0	2	#DIV/0!			Tw 2	Rp	13.500.000	Rp	2.150.000	15,93
										Tw 3	3	1	33,33			Tw 3	Rp	9.000.000	Rp	1.200.000	13,33
										Tw 4	4	2	50,00			Tw 4	Rp	4.500.000	Rp	31.610.380	702,45
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tw 1	3	0	0,00	Rp	667.050.400	Tw 1	Rp	266.820.160	Rp	9.130.000	3,42
										Tw 2	3	6	200,00			Tw 2	Rp	200.115.120	Rp	21.029.815	10,51
										Tw 3	3	3	100,00			Tw 3	Rp	133.410.080	Rp	97.423.124	73,03
										Tw 4	3	3	100,00			Tw 4	Rp	66.705.040	Rp	348.112.109	521,87
							<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Keuangan Perangkat Daerah													
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Tw 1	200	200	100,00	Rp	7.275.599.016	Tw 1	Rp	2.910.239.606	Rp	1.655.240.621	56,88
										Tw 2	200	200	100,00			Tw 2	Rp	2.182.679.705	Rp	1.945.087.109	89,11
										Tw 3	150	150	100,00			Tw 3	Rp	1.455.119.803	Rp	1.455.085.728	100,00
										Tw 4	150	150	100,00			Tw 4	Rp	727.559.902	Rp	1.770.990.012	243,42
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Tw 1	3	3	100,00	Rp	1.532.400.000	Tw 1	Rp	612.960.000	Rp	400.377.180	65,32
										Tw 2	3	3	100,00			Tw 2	Rp	459.720.000	Rp	347.558.698	75,60
										Tw 3	3	3	100,00			Tw 3	Rp	306.480.000	Rp	336.884.903	109,92
										Tw 4	3	3	100,00			Tw 4	Rp	153.240.000	Rp	338.943.153	221,18
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Tw 1	3	0	0,00	Rp	185.432.000	Tw 1	Rp	74.172.800	Rp	35.850.000	48,33
										Tw 2	3	3	100,00			Tw 2	Rp	55.629.600	Rp	35.850.000	64,44
										Tw 3	3	6	200,00			Tw 3	Rp	37.086.400	Rp	35.850.000	96,67
										Tw 4	3	3	100,00			Tw 4	Rp	18.543.200	Rp	108.110.000	583,02
							<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah													
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	111.750.000	Tw 1	Rp	44.700.000	Rp	-	0,00
										Tw 2	0	0	#DIV/0!			Tw 2	Rp	33.525.000	Rp	-	0,00
										Tw 3	60	53	88,33			Tw 3	Rp	22.350.000	Rp	39.533.760	176,88
										Tw 4	80	80	100			Tw 4	Rp	11.175.000	Rp	72.000.000	644,30
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	Tw 1	2	2	100,00	Rp	115.000.000	Tw 1	Rp	46.000.000	Rp	7.000.000	15,22
										Tw 2	2	2	100,00			Tw 2	Rp	34.500.000	Rp	41.253.066	119,57
										Tw 3	1	1	100,00			Tw 3	Rp	23.000.000	Rp	2.560.000	11,13
										Tw 4	7	8	114,29			Tw 4	Rp	11.500.000	Rp	55.253.700	480,47
							<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dan Pelaksanaan Kegiatan													
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	4.638.000	Tw 1	Rp	1.855.200	Rp	-	0,00
										Tw 2	6	6	100,00			Tw 2	Rp	1.391.400	Rp	2.045.000	146,97
										Tw 3	3	3	100,00			Tw 3	Rp	927.600	Rp	495.000	53,36
										Tw 4	3	3	100,00			Tw 4	Rp	463.800	Rp	2.004.000	432,08








										Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	Tw 1	0	0	#DIV/0!	Rp	92.120.000	Tw 1	Rp	36.848.000	Rp	6.139.758	16,66		
													Tw 2	0	0	#DIV/0!			Tw 2	Rp	27.636.000	Rp	13.787.260	49,89		
													Tw 3	0	0	#DIV/0!			Tw 3	Rp	18.424.000	Rp	23.199.710	125,92		
													Tw 4	47	45	95,74			Tw 4	Rp	9.212.000	Rp	42.720.861	463,75		
										<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Jumlah ASN (JPT, JA yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan CPNS mengikuti Prajabatan)															
	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur</b>	Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	%	90,74	100	110,20	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	Tw 1	1179	1179	100,00	Rp	1.000.484.000	Tw 1	Rp	400.193.600	Rp	368.933.409	92,19	Melaksanakan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi PNS			
											Tw 2	0	0	#DIV/0!			Tw 2	Rp	300.145.200	Rp	65.699.700	21,89				
											Tw 3	0	0	#DIV/0!			Tw 3	Rp	200.096.800	Rp	-	0,00				
											Tw 4	109	60	55,05			Tw 4	Rp	100.048.400	Rp	283.523.499	283,39				
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM	Orang	Tw 1	389	389	100,00	Rp	7.173.604.000	Tw 1	Rp	2.869.441.600	Rp	473.911.675	16,52	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi untuk PNS, CPNS dan PPPK			
											Tw 2	439	439	100,00			Tw 2	Rp	2.152.081.200	Rp	1.665.744.244	77,40				
											Tw 3	1047	1165	111,27			Tw 3	Rp	1.434.720.800	Rp	1.450.613.327	101,11				
											Tw 4	183	183	100,00			Tw 4	Rp	717.360.400	Rp	3.086.808.921	430,30				

Ket :

\* Pada kolom (14) diisi dengan KAS ANGGARAN pada DPA

Tanjung Redeb, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BERAU

  
Hj. SRLEKA TAKARIYATI, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651212 199403 2 008